a-empat

Masrukhin Muhsin dkk

KORELASI ANTARA KURIKULUM KKNI DENGAN INDONESIA MENGHADAPI MEA

(Studi Kasus di SPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan PPs IAIN SMH Banten)

Pusat Penelitian dan Penerbitan
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)
IAIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten
1436 H./2015 M.

a-empat

Masrukhin Muhsin dkk

KORELASI ANTARA KURIKULUM KKNI DENGAN INDONESIA MENGHADAPI MEA

(Studi Kasus di SPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan PPs IAIN SMH Banten)

Pusat Penelitian dan Penerbitan
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)
IAIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten
1436 H./2015 M.

Diterbitkan oleh:
Pusat Penelitian dan Penerbitan
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP2M)
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
“Sultan Maulana Hasanuddin” Banten

Bekerja sama dengan:
Penerbit A-Empat
Puri Kartika Banjarsari C1/1 Serang 42123
www.a-empat.com
E-mail: info@a-empat.com

Korelasi antara Kurikulum KKNI dengan Indonesia Menghadapi MEA:Studi Kasus di SPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan PPs IAIN SMH Banten

Penulis :
Masrukhin Muhsin dkk

Tata letak & Perancang sampul :
Tim kreatif A4

Cetakan 1, Agustus 2015
viii + 150 hlm.

ISBN: 978-602-0846-22-4

KORELASI ANTARA KURIKULUM KKNI
DENGAN INDONESIA MENGHADAPI MEA
(Studi Kasus di SPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
dan PPs IAIN SMH Banten)

Disusun Oleh:

Konsultan	: Prof. Dr. H.M.A. Tihami, M.A., M.M.
Ketua	: Dr. H. Masrukhin Muhsin, Lc., M.A.
Anggota	: Dr. Sohari, M.M.
Anggota	: Titin Meity Ade Chendrakasih, M.Pd

Pusat Penelitian dan Penerbitan
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP2M)
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
"Sultan Maulana Hasanuddin" Banten
1436 H./2015 M.

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENELITIAN KELOMPOK
TAHUN ANGGARAN 2015

Judul Penelitian : Korelasi antara Kurikulum KKNI dengan Indonesia Menghadapi MEA:Studi Kasus di SPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan PPs IAIN SMH Banten

Peneliti:

1. Nama : 1. Prof. Dr. H.M.A. Tihami HS, M.A (Konsultan)
   2. Dr. H. Masrukhin Muhsin, Lc., M.A (Ketua)
   3. Dr. H. Sohari, M.H (Anggota)
   4. Titin Meity Ade Chendrakasih, M.Pd (Anggota)

2. Fakultas/Jurusan : Program Pascasarjana IAIN SMH Banten /Pendidikan Agama Islam
3. Waktu Penelitian : Juni s/d Oktober 2015
4. Biaya : Rp. 22.500.000,-

Serang, Oktober 2015
Ketua Peneliti,

Dr. H. Masrukhin Muhsin, Lc., M.A
NIP. 19720202 199903 1 004

Mengesahkan,

Ketua LP2M	Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
Mufti Ali, Ph.D	**Drs. Wazin, MSI**
NIP. 19720806 200012 1 001	NIP. 19630225 199003 1 005

Menyetujui,
Rektor IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A.
NIP. 19580324 198703 1 003

KORELASI ANTARA KURIKULUM KKNI
DENGAN INDONESIA MENGHADAPI MEA
(Studi Kasus di SPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
dan PPs IAIN SMH Banten)

Masrukhin Muhsin

Abstrak

Bahwa ada korelasi antara kurikulum KKNI dengan Indonesia menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). MEA dapat menjadi peluang bagi SDM terampil dan handal untuk menyalurkan kompetensi yang dimiliki secara lebih luas di kawasan, tidak terbatas di dalam negeri saja. Peningkatan kompetensi *soft skill* dan *hard skill* merupakan agenda utama agar bisa merespon perubahan tersebut. *Hard skill* bisa dilakukan dengan peningkatan berbagai ketrampilan seperti, pembudidayaan tanaman, pemasaran produk, penggunaan alat/teknologi. Sedangkan *soft skill* lebih kepada pengembangan sikap dan mengelola manusia seperti, kepemimpinan, kerja sama, komunikasi dan pengembangan pribadi. Itu semua bisa dicapai dengan mempersiapkan kurikulum (KKNI) yang handal, yang dapat menghasilkan alumni yang mampu bersaing di kawasan regional ASEAN.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah Swt., karena berkat *rahmat*, *taufiq* dan *hidayah*-Nya, penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw.

Dalam penelitian ini, peneliti bersama teman-teman sejawat ingin membuktikan adanya korelasi antara kurikulum KKNI dengan Indonesia menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). Dengan adanya penelitian ini, diharapkan masyarakat Indonesia pada umumnya dan PPs IAIN SMH pada khususnya bisa mempersiapkan diri untuk bersaing di kawasan regional ASEAN dalam bidang Sumber Daya Manusia.

Ucapan terima kasih yang sangat dalam dan tak patut dilupakan peneliti sampaikan kapada pertama, Prof. Dr. H.M.A. Tihami, HS, M.A, selaku konsultan, kedua, Dr. H. Sohari, M.H. dan ketiga, Titin Meity Ade Chendrakasih, M.Pd, selaku anggota peneliti, dan handai taulan yang telah banyak memotivasi kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini.

Kepada semua pihak yang telah disebutkan di atas, peneliti mendo'akan semoga jasa dan amal baik mereka diterima dan diberi balasan yang setimpal oleh Allah Swt., *âmîn*.

Akhirnya, peneliti menyadari bahwa penelitian ini mungkin di sana sini masih terdapat kekurangan, baik dari segi isi, metodologi, maupun bahasa dan sebagainya. Untuk itu, saran dan kritik yang konstruktif guna perbaikan penelitian ini sangat peneliti hargai dan terima dengan senang hati. Semoga penelitian ini ada manfa'atnya guna menambah khazanah ilmu pengetahuan Islam.

Wa Allâh A'lam bi al-Shawâb

Serang, Oktober 2015

Peneliti

DAFTAR ISI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya atau tidak adanya korelasi antara kurikulum berbasis KKNI dengan Indonesia menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN (MEA). Perubahan kurikulum dalam sebuah neagara sesungguhnya merupakan sebuah keniscayaan, sebagai bagian dari proses penyempurnaan dan peningkatan mutu pendidikan. Dalam konteks ini, Indonesia –sejak lepas dari jajahan Belanda dan Jepang- sudah beberapa kali melakukan perubahan kurikulum, yakni sekitar 6 (enam) kali perubahan.[1] Ironisnya, perubahan kurikulum di Indonesia seringkali tidak dibarengi dengan sosialisasi secara menyeluruh kepada pelaksana pendidikan, sehingga yang seringkali terjadi adalah "ketidakpahaman dan ketidaksiapan" para penyelenggara pendidikan dalam mengimplementasikan perubahan kurikulum tersebut.

Sebut saja misalnya kasus kebijakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004 yang kemudian dianggap kurang sukses dalam implementasi di lapangan karena persoalan tidak menyeluruhnya informasi yang diterima oleh penyelenggara proses

---

[1] Dede Rosyada dan Wahdi Sayuthi, "Problematika Penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di Madrasah" dalam *Edukasi*, Vol.5, No. 1, Januari-Maret 2007 (Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2007), 7.

pendidikan. Bahkan beberapa ahli menilai bahwa KBK 2004 tidak banyak digunakan karena persoalan minimnya informasi dan *skill* penyelenggaraan pendidikan dalam mengimplementasikan KBK 2004 tersebut. Sampai kemudian muncul kebijakan baru tahun 2006 dengan lahirnya model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), yang dikembangkan dari KBK tahun 2004.[2] Dan pada akhirnya pemerintah kembali meluncurkan kebijakan baru yaitu kurikulum berbasis KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) yang tentunya masih merupakan kelanjutan dan penjabaran dari kurikulum sebelumnya. Kebijakan ini mengandung kontroversi di tengah masyarakat dan dinilai oleh berbagai kalangan sebagai suatu bentuk "kebingungan" pemerintah dalam menata system pendidikan, dan pemerintah dianggap tidak memiliki visi yang jelas terhadap arah pendidikan di Indonesia.

Kurikulum merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pendidikan, walaupun unsur pendidik/guru/dosen dengan berbagai tugas profesionalnya sering dipandang jauh lebih penting. Akan tetapi, gambaran arah layanan pendidikan yang diberikan sekolah pada para pelanggan utamanya, terlihat dalam dokumen kurikulum. Struktur mata pelajaran/kuliah yang akan dibelajarkan pada para siswa juga tergambar dalam dokumen kurikulum, bahkan sekwensi bahan ajar yang akan dipelajari siswa juga terlihat dalam dokumen tersebut. Demikian pula pada *school culture* yang mempengaruhi perubahan-perubahan sikap dan

---

[2] Dede Rosyada dan Wahdi Sayuthi, "Problematika Penerapan Kurikulum…", 7

perilaku siswa, kode etik siswa, tata tertib sekolah, serta berbagai pola hubungan antar warga sekolah, menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam proses pembentukan sikap dan karakter siswa. Jika kurikulum diartikan secara holistik, maka kurikulum bukan sesuatu yang sederhana. Kurikulum bukan sekedar *course out line*, kurikulum juga bukan sekedar rangkaian *list of Subjects*, tapi kurikulum adalah keseluruhan.[3]

Ronald C Doll menegaskan bahwa kurikulum adalah seluruh pengalaman yang ditawarkan pada peserta didik di bawah arahan dan bimbingan sekolah.[4] Sejalan dengan itu, Keneth T Henson mengidentifikasi pengertian kurikulum yang mewacana dalam diskursus akademik, antara lain, menurutnya, kurikulum adalah: 1. Sesuatu yang akan dibelajrkan di sekolah; 2. Struktur mata pelajaran; 3. Bahan yang akan dipelajari oleh siswa; 4. Program-program belajar; 5. Sekwensi bahan-bahan ajar; 6. Gambaran tentang citra hasil proses studi; 7. Rangkaian mata pelajaran dan bahan ajar yang akan dipelajari siswa; 8. Segala sesuatu yang terjadi di sekolah, termasuk di dalamnya kegiatan ekstra kurikuler, bimbingan dan konseling, dan pola hubungan interpersonal antar siswa, siswa dengan guru, siswa dengan tata usaha dan antar seluruh warga sekolah; 9. Segala sesuatu yang dibelajarkan pada siswa, dalam kelas atau di luar kelas; 10. Segala

---

[3] Dede Rosyada dan Wahdi Sayuthi, "Problematika Penerapan Kurikulum…", 9.

[4] Ronald C Doll, *Curriculum Improvement, Decision Making and Process* (Boston: Allyn and Bacon, 1964), 15.

macam pengalaman siswa sebagai hasil dari proses mereka sekolah.[5]

Pada akhirnya, walaupun beberapa pengertian masih menuju pada kurikulum tertulis, Kenneth T Henson memahami kurikulum tertulis (*the written curriculum*) yang lazim menjadi bahan kurikulum terdokumentasi, serta kurikulum terselubung (*the bidden curriculum*), yang menjadi program sekolah dalam rangka pengembangan aktifitas siswa, tapi tidak tertulis dalam dokumen kurikulum, dan justru tertuang dalam dokumen lain, seperti kode etik siswa, tata tertib sekolah, dan lainnya.[6]

Kurikulum berbasis KKNI mulai diundangkan pada tahun 2010 dan mulai diimplemantasikan pada tahun 2014. Di IAIN SMH Banten kurikulum berbasis KKNI mulai diterapkan pada anak didik angkatan 2014/2015 atau yang sekarang duduk di semester dua, termasuk di dalamnya program pascasarjana IAIN SMH Banten. pada strata satu kurikulum berbasis KKNI terdiri dari 144 Sks atau 16 Sks lebih sedikit dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya, kurikulum 2007. Sementara pada strata dua hanya terdiri dari 72 Sks.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mulai diterapkan tidak lama lagi, dua atau tiga tahun kedepan. Di mana persaingan di bidang ekonomi, pendidikan, budaya dan lain-lain akan semakin terbuka paling tidak untuk kawasan ASEAN. Perguruan tinggi

---

[5] Kenneth T Henson, *Curriculum Development for Education Reform* (New York: Harper Collin College, 1995), 6.

[6] Dede Rosyada dan Wahdi Sayuthi, "Problematika Penerapan Kurikulum…", 10.

yang merupakan produsen sumber daya manusia dituntut untuk bisa bersaing di antara Negara-nedara anggota ASEAN, supaya tidak menjadi tamu di negaranya sendiri. Oleh karena itu kurikulum berbasis KKNI ini merupakan salah satu jawaban agar perguruan tinggi di Indonesia bisa bersaing dengan perguruan tinggi di kawasan ASEAN dalam memproduk sumber daya manusia. Berangkat dari latar belakang di atas peneliti ingin membuktikan bagaimana **korelasi antara kurikulum berbasis KKNI dengan Indonesia menghadapi MEA**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas peneliti ingin membuktikan bagaimana korelasi antara kurikulum berbasis KKNI dengan Indonesia menghadapi MEA?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini ingin membuktikan bagaimana korelasi antara kurikulum berbasis KKNI dengan Indonesia menghadapi MEA.

D. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi lembaga IAIN SMH Banten khususnya program pascasarjana untuk bisa lebih meningkatkan kualitas kurikulumnya dan tentunya mampu memproduk/menghasilkan alumni yang bisa bersaing di MEA.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian dengan tema kurikulum sudah banyak dilakukan, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dede Rosyada dan Wahdi Sayuthi yang berjudul "*Problematika Penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di Madrasah*". Dalam penelitiannya ini, Dede dan dan Wahdi berkesimpulan bahwa perubahan kurikulum model KBK menjadi model kurikulum KTSP ini sesungguhnya perlu disikapi sebagai ikhtiar positif dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, karena bagaimanapun, perubahan kurikulum ini membawa implikasi positif bagi pelaksanaan pendidikan di Indonesia, termasuk madrasah. Setidaknya ada lima implikasi positif yang dapat diambil dari penerapan KTSP ini, yakni: 1) Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum menjadi dinamis dengan pemecahan masalah yang secara langsung dapat ditangani pada tingkat madrasah; 2) Pengelolaan kurikulum sepenuhnya ditangani oleh madrasah sesuai dengan dengan kemampuan dan kebutuhannya; 3) Tenaga-tenaga kependidikan yang potensial di madrasah dapat dilibatkan dalam penyusunan silabus, pelaksanaan, dan penilaiannya. 4) Sumber-sumber daya pendidikan lainnya yang terdapat di madrasah dapat dimanfaatkan untuk penyusunan silabus; 5) Sumber-sumber

informasi lain termasuk multimedia dapat dimanfaatkan untuk memperkaya penyusunan silabus dan pelaksanaannya.[7]

Penelitian ini tentu berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Letak perbedaannya adalah pada tema dan lokasi penelitian. Tema penelitian yang dilakukan oleh Dede adalah problematika penerapan kurikulum KTSP, sementara tema penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah korelasi kurikulum berbasis KKNI. Lokasi penelitian yang dilakukan oleh Dede adalah perpustakaan, sementara lokasi penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan, yaitu SPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan PPs IAIN SMH Banten.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Anas Aijudin dengan judul "*Pesantren Tahfidziyah: Analisis Pengembangan Kurikulum di PP al-Muayyad Windan Sukoharjo*". Dalam penelitiaannya, Anas berkesimpulan *pertama*: kurikulum yang dikembangkan oleh pesantren al-Muayyad Windan adalah kurikulum terpadu yaitu penguasaan terhadap teks agama yang bersumber pada kitab kuning dan kecakapan mengimplementasikannya dalam masyarakat. *Kedua*: metode kurikulum terpadu tersebut terbagi pada tiga ranah *faqohah*, *thabi'ah* dan *kafa'ah*.[8]

---

[7] Dede Rosyada dan Wahdi Sayuthi, "Problematika Penerapan Kurikulum…", 21.

[8] Anas Aijudin, "Pesantren Tahfidziyah: Analisis Pengembangan Kurikulum di PP al-Muayyad Windan Sukoharjo" dalam *Edukasi*, Vol. VII, No. 4 Oktober-Desember 2009 (Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Depag RI, 2009), 51..

Penelitian ini tentu berbeda berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Letak perbedaannya adalah pada tema dan lokasi penelitian. Tema penelitian yang dilakukan oleh Anas adalah pengembangan kurikulum di PP al-Muayyad Windan Sukoharjo, sementara tema penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah korelasi kurikulum berbasis KKNI. Lokasi penelitian yang dilakukan oleh Dede adalah PP al-Muayyad Windan Sukoharjo, sementara lokasi penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan, yaitu SPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan PPs IAIN SMH Banten.

F. Kerangka Teori

Kurikulum merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pendidikan, walaupun unsur pendidik/guru/dosen dengan berbagai tugas profesionalnya sering dipandang jauh lebih penting. Akan tetapi, gambaran arah layanan pendidikan yang diberikan sekolah pada para pelanggan utamanya, terlihat dalam dokumen kurikulum. Struktur mata pelajaran/kuliah yang akan dibelajarkan pada para siswa juga tergambar dalam dokumen kurikulum, bahkan sekwensi bahan ajar yang akan dipelajari siswa juga terlihat dalam dokumen tersebut. Demikian pula pada *school culture* yang mempengaruhi perubahan-perubahan sikap dan perilaku siswa, kode etik siswa, tata tertib sekolah, serta berbagai pola hubungan antar warga sekolah, menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam proses pembentukan sikap dan karakter siswa.

Jika kurikulum diartikan secara holistik, maka kurikulum bukan sesuatu yang sederhana. Kurikulum bukan sekedar *course out line*, kurikulum juga bukan sekedar rangkaian *list of Subjects*, tapi kurikulum adalah keseluruhan.[9]

Ronald C Doll menegaskan bahwa kurikulum adalah seluruh pengalaman yang ditawarkan pada peserta didik di bawah arahan dan bimbingan sekolah.[10] Sejalan dengan itu, Keneth T Henson[11] memahami kurikulum tertulis (*the written curriculum*) yang lazim menjadi bahan kurikulum terdokumentasi, serta kurikulum terselubung (*the bidden curriculum*), yang menjadi program sekolah dalam rangka pengembangan aktifitas siswa, tapi tidak tertulis dalam dokumen kurikulum, dan justru tertuang dalam dokumen lain, seperti kode etik siswa, tata tertib sekolah, dan lainnya.[12]

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari tempatnya, jenis penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah penelitian kancah atau penelitian lapangan (*field research*). Sesuai dengan bidangnya, maka kancah peneliti akan berbeda-beda tempatnya. Penelitian pendidikan mempunyai

---

[9] Dede Rosyada dan Wahdi Sayuthi, "Problematika Penerapan Kurikulum…", 9.

[10] Ronald C Doll, *Curriculum Improvement, Decision Making and Process* (Boston: Allyn and Bacon, 1964), 15.

[11] Henson, *Curriculum Development for Education Reform*, 6.

[12] Dede Rosyada dan Wahdi Sayuthi, "Problematika Penerapan Kurikulum…", 10.

kancah bukan saja di sekolah tetapi dapat di keluarga, di masyarakat, di pabrik, di rumah sakit, asal semuanya mengarah tercapainya tujuan pendidikan.[13]Yang menjadi lokasi dalam penelitian ini adalah SPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan PPs IAIN SMH Banten.

Dilihat dari tujuannya, jenis penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah penelitian *developmental* atau penelitian pengembangan.[14] Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan atau melanjutkan dari penelitian-penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya.

2. Sumber Penelitian

Dalam penelitian lapangan, sumber penelitian atau biasa disebut dengan sumber data bisa diperoleh melalui: 1) *observasi* (pengamatan) yaitu meliputi melakukan pengamatan, pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. 2) *Interview* (wawancara), 3) Dokumentasi.[15]

3. Metode Analisis yang Digunakan

---

[13] Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), cet XI, 11.

[14] Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* 8-9.

[15] Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada, 2009), 121.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian kualitatif bisa memilih salah satu dari tiga hal tersebut di bawah ini, yaitu: 1) deskriptif atau deskriptif analitis, 2) komparatif dan 3) korelasi. Apabila penelitian komparasi bertujuan untuk mengetahui kesamaan dan perbedaan, maka penelitian korelasi bertujuan untuk menemukan ada tidaknya hubungan dan apabila ada, berapa erat hubungan serta berarti atau tidak hubungan itu.[16] Dalam penelitian ini ketiga metode tersebut bisa digunakan sebagai pisau analisis data-data yang tersedia atau terkumpul dari kedua perguruan tinggi, yaitu SPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan PPs IAIN SMH Banten.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini terdiri dari enam bab, yaitu:

Bab pertama, pendahuluan. Bab ini menjadi landasan dan pijakan peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Bab ini dibagi menjadi delapan sub judul, yaitu: *Pertama*, latar belakang masalah yang menjelaskan alasan dilakukannya penelitian ini. *Kedua*, rumusan masalah, merupakan masalah yang akan dibuktikan dalam kesimpulan. *Ketiga*, tujuan penelitian, merupakan tujuan dari penelitian ini yaitu ingin membuktikan korelasi antara kurikulum berbasis KKNI dengan Indonesia menghadapi MEA. *Keempat*, Manfaat/signifikansi penelitian. *Kelima*, penelitian terdahulu yang relevan, yang memuat tentang penelitian-penelitian

---

[16] Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* 251.

dan tulisan-tulisan yang membahas masalah yang sedang diteliti guna menghindari pengulangan kajian. *Keenam*, kerangka teori. *Ketujuh,* metode penelitian yang menggambarkan tentang metode, pendekatan serta langkah-langkah taktis yang dilakukan dalam penelitian ini. Di dalamnya juga dijelaskan sumber-sumber data yang menjadi acuan dalam penelitian ini. *Kedelapan*, sistematika penulisan. Bagian ini menjelaskan tentang rangkaian urutan pembahasan dari awal hingga akhir atau boleh dikatakan logika pembaban atau alasan bab per bab.

Bab kedua, Kurikulum berbasis KKNI dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Bab ketiga, Profil Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Bab keempat, Profil Program Pascasarjana IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Bab kelima, Korelasi Kurikulum KKNI dengan Indonesia menghadapi MEA.

Bab keenam, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang sesuai dengan penemuan dalam penelitian. Bab ini berisi tentang pembuktian atau jawaban dari masalah penelitian.

BAB II
KURIKULUM BERBASIS KKNI
DAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

A. Kurikulum Berbasis KKNI

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau disingkat KKNI merupakankerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Pernyataan ini ada dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.[1]

Sangat penting untuk menyatakan juga bahwa KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional dan pelatihan yang dimiliki negara Indonesia. Maknanya adalah, dengan KKNI ini memungkinkan hasil pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, diperlengkapi dengan perangkat ukur yang memudahkan dalam melakukan penyepadanan dan penyejajaran dengan hasil pendidikan bangsa lain di dunia. KKNI juga menjadi alat yang

---

[1] Illah Sailah, dkk. *Buku Kurikulum Pendidikan Tinggi* (Jakarta: Direktorat Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2014), 11.

dapat menyaring hanya orang atau SDM yang berkualifikasi yang dapat masuk ke Indonesia.

Dengan fungsi yang komprehensif ini menjadikan KKNI berpengaruh pada hampir setiap bidang dan sektor di mana sumber daya manusia dikelola, termasuk di dalamnya pada sistem pendidikan tinggi, utamanya pada kurikulum pendidikan tinggi.[2]

1. KKNI Sebagai Tolok Ukur

Pergeseran wacana penamaan kurikulum pendidikan tinggi dari KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) ke penamaan Kurikulum Pendidikan Tinggi (K.DIKTI) memiliki beberapa alasan yang penting untuk dicatat, diantaranya:[3]

a) Penamaan KBK tidak sepenuhnya didasari oleh ketetapan peraturan, sehingga masih memungkinkan untuk terus berkembang. Hal ini sesuai dengan kaidah dari kurikulum itu sendiri yang terus berkembang menyesuaikan pada kondisi terkini dan masa mendatang.

b) KBK mendasarkan pengembangannya pada kesepakatan penyusunan kompetensi lulusan oleh perwakilan penyelenggara program studi yang akan disusun kurikulumnya. Kesepakatan ini umumnya tidak sepenuhnya merujuk pada parameter ukur yang pasti, sehingga memungkinkan pengembang kurikulum menyepakati kompetensi lulusan yang kedalamanatau level capaiannya berbeda dengan pengembang kurikulum lainnya

---

[2] Illah Sailah, dkk. *Buku Kurikulum Pendidikan Tinggi*, 11

[3] Illah Sailah, dkk. *Buku Kurikulum Pendidikan Tinggi*, 11-12

walaupun pada program studi yang sama pada jenjang yang sama pula.

c) Ketiadaan parameter ukur dalam sistem KBK menjadikan sulit untuk menilai apakah program studi jenjang pendidikan yang satu lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain. Artinya, tidak ada yang dapat menjamin apakah kurikulum program D4 misalnya lebih tinggi dari program D3 pada program studi yang sama jika yang menyusun dari kelompok yang berbeda.

d) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) memberikan parameter ukur berupa jenjang kualifikasi dari jenjang 1 terendah sampai jenjang 9 tertinggi. Setiap jenjang KKNI bersepadan dengan level Capaian Pembelajaran (CP) program studi pada jenjang tertentu, yang mana kesepadannya untuk pendidikan tinggi adalah level 3 untuk D1, level 4 untuk D2, level 5 untuk D3, level 6 untuk D4/S1, level 7 untuk profesi (setelah sarjana), level 8 untuk S2, dan level 9 untuk S3.

e) CP pada setiap level KKNI diuraikan dalam diskripsi sikap dan tata nilai, kemampuan, pengetahuan, tanggung jawab dan hak dengan pernyataan yang ringkas yang disebut dengan deskriptor generik. Masing-masing deskriptor mengindikasikan kedalaman dan level dari CP sesuai dengan jenjang program studi.

f) K.DIKTI sebagai bentuk pengembangan dari KBK menggunakan level kualifikasi KKNI sebagai pengukur CP sebagai bahan penyusun kurikulum suatu program studi.

g) Perbedaan utama K.DIKTI dengan KBK dengan demikian adalah pada kepastian dari jenjang program studi karena CP yang diperoleh memiliki ukuran yang pasti.

2. Capaian Pembelajaran sebagai Bahan Utama Penyusunan K.DIKTI

Akuntabilitas penyusunan K.DIKTI dapat dipertanggung jawabkan dengan adanya KKNI sebagai tolok ukur dalam penyusunan Capaian Pembelajaran (CP). Secara khusus kewajiban menyusun CP yang menggunakan tolok ukur jenjang KKNI dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik IndonesiaNomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi pada pasal 10 ayat 4, yakni : setiap program studi wajib menyusun deskripsi capaian pembelajaran minimal mengacu pada KKNI bidang pendidikan tinggi sesuai dengan jenjang.

Bahkan pada ayat yang sama juga dinyatakan bahwa: setiap program studi wajib menyusun kurikulum, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum mengacu pada KKNI bidang pendidikan tinggi. Jelas bahwa semua perguruan tinggi di Indonesia yang menyelenggarakan program studi harus mengembangkan kurikulum dan menyusun CP dengan menggunakan KKNI sebagai tolok ukurnya.

Capaian pembelajaran dapat dipandang sebagai resultan dari hasil keseluruhan proses belajar yang telah ditempuh oleh seorang pembelajar/mahasiswa selama menempuh studinya pada

satu program studi tertentu, dimana unsur capaianpembelajaran mencakup: Sikap dan tata nilai, Kemampuan, pengetahuan, dan tanggung jawab/hak. Seluruh unsur ini menjadi kesatuan yang saling mengait dan juga membentuk relasi sebab akibat. Oleh karenanya, unsur CP dapat dinyatakan sebagai: siapapun orang di Indonesia, dalam perspektif sebagai SDM, pertamatama harus memiliki sikap dan tata nilai keindonesiaan, padanya harus dilengkapi dengan kemampuan yang tepat dan menguasai/ didukung oleh pengetahuan yang sesuai, maka padanya berlaku tanggung jawab sebelum dapat menuntut/mendapat hak-nya. Apabila unsur pada CP tersebut dijadikan bahan utama dalam penyunan kurikulum pada program studi, maka lulusannya akan dapat mengkonstruksi dirinya menjadi pribadi yang utuh dan unggul dengan karakter yang kuat dan bersih.[4]

3. Ruang Lingkup Standar Nasional Penelitian

Setelah menunggu cukup lama sejak diundangkannya PP 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, maka pada tanggal 9 Juni 2014 telah lahir Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dimana pada pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa SN.DIKTI terdiri atas: (a) Standar Nasional Pendidikan; (b) Standar Nasional Penelitian; dan (c) Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa ke tiga standar tersebut di atas merupakan satu

---

[4] Illah Sailah, dkk. *Buku Kurikulum Pendidikan Tinggi*, 13-14

kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.[5]

Mengingat sifat SN.DIKTI yang mengikat bagi seluruh lembaga penyelenggara pendidikan tinggi di Indonesia, maka sangat diperlukan persamaan tafsir terhadap isi dari SN.DIKTI tersebut agar hakekat dan tujuan diterbitkannya SN.DIKTI dapat tercapai sesuai dengan yang dicita-citakan.

Standar Nasional Penelitian merupakan hal baru yang diatur secara konstitusional dalam sebuah peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia karena selama ini perhatian kita jika membahas kegiatan penelitian di perguruan tinggi hanya mengatur tentang hal ikhwal dosen dalam melaksanaan kegiatan penelitian. Sementara itu kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai bagian tak terpisahkan dari kegiatan pendidikan atau pembelajaran belum pernah diatur secara tegas tentang standar yang dapat menyetarakan capaian pembelajaran peserta didik di perguruan tinggi sehingga akan memudahkan penilaian tentang mutu hasil pembelajaran yang telah dilakukan oleh perguruan tinggi di Indonesia.

Sebagaimana telah diatur dalam SN.DIKTI Bab I, pasal 1 ayat 3 yang dimak- sud dengan Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistempenelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih jauh dijelaskan bahwa yang dimaksud

---

[5] Illah Sailah, dkk. *Buku Kurikulum Pendidikan Tinggi*, 15.

dengan penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah.

DIKTI secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

Dalam BAB III Pasal 42 SNDIKTI telah disebutkan bahwa ruang lingkup Standar Nasional Penelitian terdiri atas: a.standar hasil penelitian; b.standar isi penelitian; c.standar proses penelitian; d.standar penilaian penelitian; e. standar peneliti; f. standar sarana dan prasarana penelitian; g.standar pengelolaan penelitian; dan h.standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

Namun karena target pembaca adalah mahasiswa maka hanya butir (a) s/d (d) yang akan dibahas dari pedoman penyusunan kurikulum ini. Hasil penelitian mahasiswa, yang diatur dalam SNDIKTI selain harus mememenuhi ketentuan pada pasal 43 ayat (2), harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

Proses kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus memenuhiketentuan pada pasal 45 ayat (2) dan ayat (3), juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 3 SNDIKTI. Standar

penilaian penelitian diatur dalam pasal 46 dan merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian prosesdan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit: a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. (3) Penilaian proses dan hasil penelitian, selain memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. (4) Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian. (5) Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan dan peraturandi perguruan tinggi. Agar tidak terjadi perbedaan pemahaman terhadap substansi SNDIKTI maka perlu disusun suatu pedoman penyusunan kurikulum dengan menyajikan butir-butir perbedaan diantara jenjang akademik yang terdapat di setiap perguruan tinggi.

Dalam kaitannya dengan kualifikasi capaian pembelajaran terbitnya Permendikbud No 49 tahun 2014 tentang SNDIKTI ini menjadi pelengkap bagi terbitnya Peraturan Presiden No 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang mendorong seluruh penyelenggara pendidikan di Indonesia untuk dapat menyesuaikan perubahan kurikulumnya dengan mengacu kepada dua sumber hukum tersebut di atas agar kualifikasi kompetensi yang dihasilkan dapat disandingkan, disetarakan, dan diintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Selain Standar Nasional Penelitian SNDIKTI juga mengatur tentang Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana tercantum dalam BAB IV.

B. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

1. Latar Belakang Pembentukan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

Negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN terus menggeliat dan terbukti dengan terus bertambahnya negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang bergabung dalam asosiasi ini. Hingga kini anggota ASEAN terdiri dari sepuluh negara yaitu: Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Cambodia (ASEAN Documentary series,1985).

Komitmen untuk menciptakan suatu Masyarakat ASEAN (ASEAN Community) sebagaimana dideklarasikan dalam visi tersebut, kemudian semakin dikukuhkan melalui ASEAN Concord II pada Pertemuan Puncak di Bali Oktober 2003, atau yang lebih dikenal sebagai Bali Concord II, di mana para pemimpin ASEAN mendeklarasikan pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community) sebagai tujuan dari integrasi ekonomi kawasan pada 2020. Dalam Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN (ASEAN Economic Ministers Meeting – AEM) yang diselenggarakan pada bulan Agustus 2006 di Kuala Lumpur, komitmen yang kuat menuju terbentuknya integrasi ekonomi kawasan ini diejawantahkan ke dalam gagasan pengembangan sebuah cetak biru menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN yang kemudian secara terperinci disahkan dan diadopsi oleh seluruh negara anggota ASEAN pada November 2007. Bahkan, sebelumnya dalam Pertemuan Puncak ASEAN ke-12 pada Januari 2007, komitmen yang kuat para pemimpin negara-negara ASEAN terhadap pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN ini, semakin tercermin dari disepakatinya upaya percepatan terwujudnya komunitas tersebut pada tahun 2015. Pada pertemuan tersebut, para pemimpin ASEAN sepakat untuk mempercepat pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 dan mentransformasikan ASEAN menjadi sebuah kawasan di mana barang, jasa, investasi, pekerja terampil, dan arus modal dapat bergerak dengan bebas.[6] (Mantra, 2011)

---

[6] Dodi Mantra,. *Hegemoni & Diskursus Neoliberalisme*.

Dalam perkembangannnya sejak awal tahun 1990-an, perkembangan ASEAN di pengaruhi 3 dinamika eksternal, yaitu:

a) Kecenderungan perubahan lingkungan strategis global yang menuntut negara-negara di dunia untuk meningkatkan daya saingnya.
b) Melemahnya daya saing ASEAN akibat munculnya kekuatan baru Cina dan India pada tataran regional dan
c) (3)Terdapat gerakan kearah pengintegrasian kekuatan ekonomi yang berbasis pada pasar tunggal (*single market*) dan produksi tunggal yang terintegrasi (*single production*).

Salah satu poin yang harus digarisbawahi dari ketiga poin di atas adalah integrasi ekonomi yang berbasis pada pasar tunggal (*single market*). Berpijak pada keyakinan tersebut, disamping untuk memperkuat daya saing kawasan dalam menghadapi kompetisi global dan regional, negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam forum ASEAN telah menyepakati untuk meningkatkan proses integrasi diantara mereka melalui pembentukan *ASEAN Economic Community* (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Berdasarkan cetak biru yang telah diadopsi oleh seluruh negara anggota ASEAN, kawasan Asia Tenggara melalui pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN akan ditransformasikan menjadi sebuah pasar tunggal dan basis produksi; sebuah kawasan yang sangat

---

Mantrapress: Bekasi Thongphane Savanphet, *ASEAN-China Dialogue Relations: Present and Future*, dalam *China's.* 2011.

kompetitif; sebuah kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata; dan sebuah kawasan yang terintegrasi penuh dengan perekonomian global. Sebagai sebuah pasar tunggal dan basis produksi, terdapat lima elemen inti yang mendasari Masyarakat Ekonomi ASEAN, yaitu

1. Pergerakan bebas barang;
2. Pergerakan bebas jasa;
3. Pergerakan bebas investasi;
4. Pergerakan bebas modal;
5. Pergerakan bebas pekerja terampil.

Kelima elemen inti dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi ini dilengkapi lagi dengan dua komponen penting lainnya, yaitu sektor integrasi prioritas yang terdiri dari dua belas sektor

1. Produk berbasis pertanian; transportasi udara; otomotif;
2. E-asean; elektronik; perikanan; pelayanan kesehatan; logistik;
3. Produk berbasis logam; tekstil; pariwisata; dan produk berbasis kayu.
4. Sektor pangan, pertanian dan kehutanan.

Dalam konteks penciptaan perekonomian kawasan yang kompetitif, beragam langkah strategis telah ditetapkan dalam cetak biru Masyarakat Ekonomi ASEAN, seperti pengembangan kebijakan persaingan, perlindungan konsumen, kerjasama regional dalam Hak Kekayaan Intelektual, dan langkah-langkah lainnya seperti: kerjasama regional dalam pembangunan infrastruktur.

Begitu juga halnya dalam upaya transformasi ASEAN menuju sebuah kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata, kesepakatan negara-negara di kawasan ini mengupayakan percepatan pengembangan usaha kecil dan menengah serta perluasan Inisiatif Integrasi ASEAN (*Initiative for ASEAN Integration*) dalam rangka menjembatani jurang kesenjangan pembangunan di antara negara-negara anggotanya. Sementara itu, langkah-langkah menuju integrasi ekonomi Asia Tenggara ke dalam perekonomian global ditempuh melalui penerimaan suatu pendekatan yang koheren terhadap hubungan ekonomi eksternal, termasuk negosiasi dalam pembentukan kawasan perdagangan bebas dan kemitraan ekonomi strategis. Cetak biru inilah yang melandasi pembangunan Masyarakat Ekonomi ASEAN melalui langkah-langkah spesifik dengan periode waktu yang terperinci, di mana terciptanya suatu perekonomian kawasan yang terintegrasi atas dasar prinsip perekonomian pasar bebas dan terbuka menjadi cita-cita besar yang ingin dicapai.[7]

Integrasi ekonomi dilakukan dengan melakukan liberalisasi perdagangan antara negara yang berpartisipasi dalam integrasi, namun pada saat yang sama juga menerapkan berbagai hambatan baik tarif maupun non-tarif kepada negara ketiga atau negara di luar anggota. Kebijakan liberalisasi maupun kesepakatan integrasi tersebut digunakan sebagai alat untuk mendapatkan akses pasar

---

[7] Dodi Mantra, *Hegemoni & Diskursus Neoliberalisme*. Mantrapress: Bekasi Thongphane Savanphet, *ASEAN-China Dialogue Relations: Present and Future*, dalam *China's*. 2011.

yang lebih luas dan mendorong pertumbuhan dalam rangka meningkatkan kemakmuran (Thongphane Savanphet, 2006). Melalui perluasan perdagangan luar negeri, wilayah itu menjadi semakin terintegrasi dengan ekonomi global dan mendapatkan lebih banyak lagi keuntungan dari itu.

Pada awalnya, Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community) baru akan diterapkan pada tahun 2020. Namun belakangan rencana tersebut dipercepat dan akan diberlakukan pada tanggal 31 Desember 2015. Pemberlakuan ini dilandaskan pada hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke 12. Dengan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN economic community*) kawasan ASEAN akan menjadi pasar terbuka dan kesatuan yang berbasis produksi. Selain itu, mobilitas arus barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja akan bergerak bebas. Ada empat pilar yang menyokong Masyarakat Ekonomi ASEAN yaitu:

(1) Kawasan ekonomi berdaya saing tinggi.
(2) Pertumbuhan ekonomi yang merata dan terintegrasi pada perekonomian global.
(3) Menjadikan asean sebagai pasar tunggal
(4) Kesatuan basis produksi melalui barang dan jasa, investasi, modal dan tenaga kerja terampil (Bappenas 2009).

2. Kesiapan Indonesia dalam Menghadapi MEA

a. Kesiapan Sektor Ekonomi

Kesiapan fundamental ekonomi, eksistensi institusi dan regulasi yang kuat, adalah syarat mutlak yang harus dimiliki suatu negara secara matang sebelum menerapkan prinsip ekonomi pasar bebas. Dalam menuju terwujudnya Masyarakat Ekonomi ASEAN, kesiapan perekonomian internal yang matang dari negara-negara Asia Tenggara adalah bersifat imperatif. Terutama bagi Indonesia sebagai penggagas yang memiliki komitmen kuat terhadap integrasi ekonomi kawasan tersebut, seharusnya fundamen ekonomi negeri dengan wilayah terluas di kawasan ini telah benar-benar siap menuju integrasi. Terlebih lagi sebagai negara dengan populasi terbesar, dampak negatif dari integrasi yang berlandaskan pada liberalisasi prematur akan secara langsung dirasakan oleh rakyat yang jumlahnya lebih dari 220 juta jiwa (Mantra, 2011)

Ironisnya, di balik optimisme dan komitmen yang kuat terhadap integrasi ekonomi kawasan, kondisi perekonomian Indonesia masih jauh dari kata siap secara faktual dalam menghadapi terwujudnya Masyarakat Ekonomi ASEAN. Lebih-lebih jika kita bandingkan dengan performa perekonomian negara-negara ASEAN lainnya, terutama Singapura, Malaysia, Thailand dan Vietnam, optimisme yang diindikasikan oleh pemerintah Indonesia benar-benar harus dipertanyakan kembali dasar pijakannya. Secara lebih terperinci akan kita telaah bagaimana realitas kesiapan dan upaya persiapan yang dilakukan pemerintah Indonesia menuju integrasi ekonomi ASEAN. Telaah kritis atas kondisi riil kesiapan ekonomi dan persiapan pemerintah Indonesia ini difokuskan pada lima karakteristik dasar Masyarakat Ekonomi

ASEAN berdasarkan cetak biru yang disepakati, yaitu ASEAN sebagai sebuah pasar tunggaldan basis produksi, sebuah kawasan dengan daya saing tinggi, sebuah kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata, dan sebuah kawasan yang terintegrasi penuh dengan perekonomian global. Telaah kritis pertama dilakukan mengenai kesiapan ekonomi dan strategi pemerintah Indonesia dalam menghadapi pembentukan ASEAN sebagai sebuah pasar tunggal dan basis produksi. Bebasnya pergerakan aktifitas ekonomi dalam integrasi sebuah kawasan, membutuhkan daya saing ekonomi yang tinggi untuk menghindari dampak negatif menurunnya performa ekonomi dalam negeri karena serbuan produk-produk dari negara lain yang berdaya saing lebih tinggi. Di sektor perdagangan jasa, laporan World Economic Forum (WEF) dalam Global Competitiveness Report 2008-2009 yang mengelompokkan perekonomian Indonesia dalam fase pertama, menunjukkan bagaimana sektor jasa Indonesia kalah bersaing dengan Malaysia dan Thailand yang telah mengukuhkan diri dalam fase kedua pembangunan. Terdapat tiga kelompok negara berdasarkan fase pembangunan yang dilaporkan oleh WEF.

1. Fase pertama, yaitu fase awal pembangunan, di mana proses ekonomi sepenuhnya tergantung pada faktor-faktor keunggulan komparatif yang ada atau didorong oleh faktor-faktor alam, seperti kekayaan sumber daya alam, jumlah tenaga kerja dalam jumlah banyak dan murah (didominasi oleh tenaga kerja tidak terdidik), iklim yang baik, lokasi yang strategis, dan faktor alami lainnya.

2. Pada fase kedua, pembangunan ekonomi didorong oleh efisiensi dan produktifitas dalam pemakaian semua faktor-faktor alam tersebut. Dengan kata lain, pada fase ini, teknologi dan pendidikan mulai berperan, karena untuk meningkatkan efisiensi atau produktifitas diperlukan teknologi dan pekerja dengan pendidikan atau keahlian tinggi.

3. Fase terakhir, proses dan daya saing ekonomi sepenuhnya didorong oleh inovasi. Faktor-faktor keunggulan kompetitif, seperti teknologi, sumber daya manusia berkualitas tinggi, ketersediaan infrastruktur yang baik, iklim usaha yang kondusif, dan faktor inovatif lainnya, jauh lebih penting daripada faktor-faktor keunggulan komparatif. (Mantra, 2011).

Posisi Indonesia yang dikelompokkan pada fase pembangunan pertama menunjukkan bagaimana sektor jasa di negeri ini belum memainkan peranan yang penting, karena perekonomian masih didominasi oleh faktor-faktor alami, di mana keberadaan tenaga kerja di sektor jasa yang terdidik dan terampil masih sangat terbatas. (WEF dan Global Competitiveness Report). Bebasnya ruang gerak di kawasan ini, diasumsikan dalam pandangan neoliberal, akan menyebabkan investasi bergerak ke tempat-tempat yang dinilai menjanjikan keuntungan. Dengan kata lain, investasi akan mengalir deras ke wilayah-wilayah dengan iklim investasi yang dinilai baik. Ironisnya, di balik komitmen yang kuat menuju integrasi ekonomi ASEAN, iklim investasi Indonesia justru masih berada di bawah peringkat negara-negara lainnya di Asia Tenggara, terutama Singapura. Waktu akan terus berjalan dan

masyarakat indonesia harus bersiap untuk menghadapi MEA 2015 (Mantra, 2011)

b. Kesiapan Sektor SDM (Sumber Daya Manusia) Terampil

Sebagaimana di sebutkan pada bagian terdahulu, MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN/ ASEAN Economic Community) disokong oleh 4 pilar. Salah satu pilar tersebut adalah tenaga kerja terampil. Untuk mengantisipasi arus bebas tenaga kerja, maka disusunlah Mutual Recognition Arrangement. Mutual Recognition Arrangement (MRA) sendiri dapat diartikan sebagai kesepakatan yang diakui oleh seluruh negara ASEAN yang saling mengakui dan menerima beberapa atau semua aspek hasil penilaian seperti: hasil tes atau berupa sertifikat (Ashari, 2015)

Tujuannya adalah untuk menciptakan prosedur mekanisme akreditasi sehingga mendapat suatu kesetaraan dan pengakuan terhadap adanya perbedaan antar negara dalam beberapa bidang, diantanya: bidang pendidikan, bidang pelatihan, bidang pengalaman dan persyaratan lisensi untuk para professional yang ingin berpraktek. Hal ini penting dilakukan dilakukan guna memfasilitasi pergerakan tenaga kerja yang didasarkan pada suatu kontrak perjanjian untuk mendukung kegiatan perdagangan dan investasi di sektor jasa. Hingga tahun 2009, ada beberapa sektor Mutual Recognition Arrangement (MRA) yang telah disepakati oleh ASEAN diantaranya:

1. Jasa-jasa engineering, nursing, architectural, surveying qualification.

2. Tenaga medis (dokter umum dan dokter gigi) & nursing.
3. Jasa-jasa akuntansi yang ditandatangani oleh para menteri perekonomian negara-negara anggota ASEAN (Departemen Perdagangan Dalam Negri Indonesia, 2009).

Dari beberapa sektor yang *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) –nya telah disepakati oleh ASEAN diatas, jelas sekali bahwa salah satu faktor yang sangat esensi dalam menghadapi MEA adalah mempersiapkan tenaga kerja terampil yang memiliki kemampuan kompetisi tinggi dengan tenaga kerja terampil dari negara-negara lain.

Tetapi, sungguh disayangkan Indonesia lebih banyak mengirimkan tenaga kerja tak terdididik dan tak terampil. Kenyataan ini di buktikan dengan posisi Indonesia yang masih berada di fase pertama dari tiga fase pembangunan yang di tetapkan oleh WEF. Dimana pada fase ini proses ekonomi sepenuhnya tergantung pada faktor-faktor keunggulan komparatif yang ada atau didorong oleh faktor-faktor alam, seperti kekayaan sumber daya alam, jumlah tenaga kerja dalam jumlah banyak dan murah (didominasi oleh tenaga kerja tidak terdidik), iklim yang baik, lokasi yang strategis, dan faktor alami lainnya.

Keberadaan tenaga kerja terampil yang berkualitas dan dalam jumlah besar merupakan faktor kunci yang menentukan daya saing sumber daya manusia suatu negara. Sementara itu, terciptanya angkatan kerja yang terampil tidak terlepas dari kualitas pendidikan yang diperoleh masyarakatnya. Ironisnya, berdasarkan data United Nations Development Program (UNDP) mengenai peringkat

negara-negara di dunia berdasarkan daya saing kualitas sumber daya manusia atau dikenal dengan istilah Human Development Index (HDI) di tahun 2008, Indonesia berada di peringkat 109 dari 179 negara (Lagi-lagi daya saing sumber daya manusia Indonesia masih jauh berada di bawah negara-negara ASEAN lainnya, bahkan peringkat di tahun 2008 ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya di mana Indonesia berada di peringkat 107 dari 177 negara (http://hdr.undporg/en/statistics/ dalam Mantra, 2011).

Berdasarkan laporan HDI tahun 2008 tersebut, Brunei berada pada posisi 27, disusul Singapura di peringkat 28, Malaysia 63 dan Thailand 88.23. Dikarenakan kondisi daya saing SDM Indonesia yang rendah ini, tidak mengherankan jika tenaga kerja asing yang terampil dan terdidik, merajai bursa kerja di sektor jasa dan industri negeri ini (http://web.bisnis.com/edisi-cetak/edisi-harian/jasa-transportasi/1id63281.html dalam Mantra, 2011). Selama lima bulan pertama tahun 2008 jumlah tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia tercatat sebesar 21.267 orang. Sementara di tahun 2007 lalu, terdapat sebanyak 40.204 tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia, sehingga diasumsikan terdapat 3.350 pekerja asing setiap bulannya (http://web.bisnis.com/edisi-cetak/edisi-harian/jasa-transportasi/1id63281.html dalam Mantra, 2011).

Pekerjaan di sektor jasa yang paling diminati oleh tenaga kerja asing adalah bidang-bidang jasa konstruksi, pendidikan swasta, jasa hiburan dan jasa penunjang pertambangan. (http://web.bisnis.com/edisi-cetak/edisi-harian/jasa-transportasi/1id63281.html dalam Mantra, 2011). Kontradiksi lalu

terjadi dalam dunia SDM di negri kita ini. Di satu sisi Indonesia memang mengirimkan juga tenaga kerja dalam jumlah massive ke luar negeri, terutama di kawasan Asia Tenggara. Namun, tenaga kerja yang berasal dari Indonesia mayoritas adalah tenaga kerja tidak terampil yang memiliki daya saing rendah. Di sisi lain, lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja terampil di Indonesia justru dibombardir oleh tenaga kerja asing yang lebih berkualitas dan berdaya saing tinggi. Yang lebih menyedihkan lagi, penyerapan tenaga kerja asing yang cukup besar di Indonesia justru terjadi seiring dengan semakin tingginya angka pengangguran di dalam negeri.

c. Kesiapan pada Sektor Pendidikan Tinggi

1). Persiapan Pendidikan Tinggi dalam Menghadapi Mea

Salah satu faktor penting dalam menghadapi MEA adalah mempersiapkan tenaga kerja terampil yang memiliki kemampuan yang dapat disetarakan dengan negara lain. Salah satu dari 6 karakteristik dalam cetak biru komunitas sosial budaya ASEAN 2015 adalah pembangunan manusia (Human Development) dan sub-elemennya yang terdiri dari: 1) peningkatan dan prioritas pendidikan dan 2) investasi sumber daya manusia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan mata pencaharian rakyat di ASEAN dengan menyediakan akses yang merata untuk pembangunan manusia melalui promosi dan investasi di bidang pendidikan dan proses pendidikan sepanjang hayat, pelatihan sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas, mendorong inovasi dan kewirausahaan, mempromosikan penggunaan bahasa

Inggris, teknologi informasi dan komunikasi dan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan dalam kegiatan pembangunan ekonomi sosial.[8]

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia sebagai investasi pembangunan manusia adalah dengan mengembangkan dan memprioritaskan pendidikan yang dapat membekali lulusan dengan berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berbagai keahlian yang spesifik sesuai dengan kebutuhan masyarakat global. Jenjang pendidikan tinggi adalah tingkat pendidikan yang mesti berbenah diri dalam menyongsong kedatangan MEA.

Di Indonesia, ada empat tahapan pokok yang ada dalam sistem pendidikan tinggi, yaitu:

a. Input: Input Perguruan Tinggi (PT) adalah lulusan SMA, MA, dan SMK sederajat yang mendaftarkan diri untuk berpartisipasi mendapatkan pengalaman belajar dalam proses pembelajaran yang telah ditawarkan. Kualitas input sangat tergantung pada pengalaman belajar dan capaian pembelajaran calon mahasiswa.

b. Proses: Setelah mendaftarkan diri dan resmi menjadi mahasiswa, tahapan selanjutnya adalah menjalani proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang baik memiliki unsur yang baik dalam beberapa hal, yaitu: (1) capaian pembelajaran (learning

[8] Dodi Mantra, *Hegemoni & Diskursus Neoliberalisme*. Mantrapress: Bekasi Thongphane Savanphet, *ASEAN-China Dialogue Relations: Present and Future*, dalam *China's.* 2011. www.dekeu.go.id/presentation.

outcomes) yang jelas; (2) Organisasi PT yang sehat; (3) Pengelolaan PT yang transparan dan akuntabel; (4) Ketersediaan rancangan pembelajaran PT dalam bentuk dokumen kurikulum yang jelas dan sesuai kebutuhan pasar kerja; (5) Kemampuan dan ketrampilan SDM akademik dan non akademik yang handal dan profesional; (6) Ketersediaan sarana-prasarana dan fasilitas belajar yang memadai. Dengan memiliki keenam unsur tersebut, PT akan dapat mengembangkan iklim akademik yang sehat, serta mengarah pada ketercapaian masyarakat akademik yang profesional.

c. Output: Setelah melalui proses pembelajaran yang baik, diharapkan akan dihasilkan lulusan PT yang berkualitas. Berapa indikator yang sering digunakan untuk menilai keberhasilan lulusan PT adalah (1) IPK; (2) Lama Studi dan (3) Predikat kelulusan yang disandang. Namun proses ini tidak hanya berhenti di sini.

d. Outcomes: Untuk dapat mencapai keberhasilan, perguruan tinggi perlu menjamin agar lulusannya dapat terserap di pasar kerja. Keberhasilan PT untuk dapat mengantarkan lulusannya agar diserap dan diakui oleh pasar kerja dan masyarakat inilah yang akan juga membawa nama dan kepercayaan PT di mata calon pendaftar yang akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas dan kuantitas pendaftar (input).

Pada situasi global seperti saat ini, dimana percepatan perubahan terjadi di segala sektor, maka akan sulit bagi masyarakat untuk menahan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Pada masa sebelum tahun 1999 (pre-milleniumera) perubahan IPTEKS yang terjadi mungkin tidak sedahsyat pasca-millennium.

Jika dipahami dengan lebih dalam berdasarkan sistem pendidikan yang telah dijelaskan di atas, maka jika terjadi perubahan pada tuntutan dunia kerja sudah sewajarnyalah proses di dalam PT perlu untuk beradaptasi.

Alasan inilah yang seharusnya dikembangkan untuk melakukan perubahan kurikulum PT di Indonesia. Setelah diratifikasinya beberapa perjanjian dan komitmen global (AFTA, WTO, GATTS) oleh pemerintah Negara RI, maka dunia semakin mencair dalam berhubungan dan berinteraksi. Berbagai macam parameter kualitas akan dipasang untuk menstandarkan mutu dan kualitas lulusan di berbagai belahan bumi. Berbagai kesepakatan dan kesepahaman antar Negara-negara di ASEAN mulai ditetapkan. Roadmap atau peta pengembangan mobilitas bebas tenaga kerja professional antar Negara di ASEAN telah dibentangkan. Perkembangan roadmap tersebut dimulai semenjak tahun 2008 dengan melakukan harmonisasi berbagai peraturan dan sistem untuk memperkuat institusi pengembang SDM. (Buku K-Dikti, 2014)

Pada tahun 2010 mulailah disepakati Mutual Recognition Agreement (MRA) untuk berbagai pekerjaan dan profesi. Beberapa bidang profesi yang telah memiliki MRA hingga tahun ini adalah:

1. Engineers;
2. Architect;
3. Accountant;
4. Land surveyors;
5. Medical doctor;

6. Dentist;
7. Nurses, dan
8. Labor in tourism.

Atas dasar prinsip kesetaraan mutu serta kesepahaman tentang kualifikasi dari berbagai bidang pekerjaan dan profesi di era global, maka diperlukanlah sebuah parameter kualifikasi secara internasional dari lulusan pendidikan di Indonesia. Selain alasan tuntutan paradigma baru pendidikan global di atas, secara internal, kualitas pendidikan di Indonesia sendiri, terutama pendidikan tinggi memiliki disparitas yang sangat tinggi. Antara lulusan S1 program studi satu dengan yang lain tidak memiliki kesetaraan kualifikasi, bahkan pada lulusan dari program studi yang sama. Selain itu, tidak juga dapat dibedakan antara lulusan pendidikan jenis akademik, dengan vokasi dan profesi. Carut marut kualifikasi pendidikan ini membuat akuntabilitas akademik lembaga pendidikan tinggi semakin turun.

Pada tahun 2012, melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, dorongan sekaligus dukungan untuk mengembangkan sebuah ukuran kualifikasi lulusan pendidikan Indonesia dalam bentuk sebuah kerangka kualifikasi, yang kemudian dikenal dengan nama Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 pada pasal 1 menyatakan bahwa: Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifiasi kompetensi yang dapat

menyandingkan, menyetarakan dan mengintergrasian antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

KKNI juga disusun sebagai respon dari ratifikasi yang dilakukan Indonesia pada tanggal 16 Desember 1983 dan diperbaharui tanggal 30 Januari 2008 terhadap konvensi UNESCO tentang pengakuan pendidikan diploma dan pendidikan tinggi (*The International Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees in Higher Education in Asia and the Pasific*). Dalam hal ini dengan adanya KKNI maka negara-negara lain dapat menggunakannya sebagai panduan untuk melakukan penilaian kesetaraan capaian pembelajaran serta kualifikasi tenaga kerja baik yang akan belajar atau bekerja di Indonesia maupun sebaliknya apabila akan menerima pelajar atau tenaga kerja dari Indonesia. Sebagai rangkuman bagian ini, dapat disimpulkan perjalanan perubahan kurikulum pendidikan tinggi di Indonesia. Tahun 1994 melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 056/U/1994 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, dimana kurikulum yang mengutamakan ketercapaian penguasaan IPTEKS, oleh karenanya disebut sebagai Kurikulum Berbasis Isi. (Buku K-Dikti, 2014)

Pada model kurikulum ini, ditetapkan mata kuliah wajib nasional pada program studi yang ada. Kemudian pada tahun 2000, atas amanah UNESCO melalui konsep the four pillars of education,

yaitu learning to know, learning to do, learning to be dan learning to live together (Dellors, 1998), Indonesia merekonstruksi konsep kurikulumnya dari berbasis isi ke Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Kurikulum era tahun 2000 dan 2002 ini mengutamakan pencapaian kompetensi, sebagai wujud usaha untuk mendekatkan pendidikan pada kondisi pasar kerja dan industri. Pada Kurikulum Berbasis Kompetensi terdiri atas kurikulum inti dan institusional. Di dalam mengimplementasikan KBK, ditetapkanlah kompetensi utama oleh kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi, dan pengguna lulusan. Sedangkan kompetensi pendukung dan lain, yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri. (Buku K-Dikti, 2014)

Dengan dorongan perkembangan global yang saat ini dituntut adanya pengakuan atas capaian pembelajaran yang telah disetarakan secara internasional, dan dikembangkannya KKNI, maka kurikulum semenjak tahun 2012 mengalami sedikit pergeseran dengan memberikan ukuran penyetaraan capaian pembelajarannya. Kurikulum ini masih mendasarkan pada pencapaian kemampuan yang telah disetarakan untuk menjaga mutu lulusannya. Kurikulum ini dikenal dengan nama Kurikulum Pendidikan Tinggi. Misi pendidikan tinggi abad ke-21 dari UNESCO1 (1998) telah dirumuskan oleh The International Commission on Education for theTwenty-first Century diketuai oleh Jacques Delors (UNESCO, 1998) dapat dijadikan rujukan pengembangan kurikulum, yang isinya antara lain diuraikan di bawah ini.

2) Harapan Peran Pendidikan Tinggi ke Depan:

a. Jangkauan dari komunitas lokal ke masyarakat global.

Hal ini berdasarkan kenyataan adanya saling ketergantungan secara global untuk merespon perubahan-perubahan yang terjadi akibat kesenjangan antar negara miskin dan kaya. Pembangunan pesat yang kurang terkendali dipandang sebagai permasalahan dan ancaman global untuk dicarikan solusinya secara bersama. Dibutuhkan saling pengertian, solidaritas, serta tanggungjawab tinggi dalam perbedaan budaya dan agama untuk dapat hidup dalam masyarakat global secara harmonis. Akses pendidikan untuk semua orang sangat diperlukan untuk membantu memahami dunia secara utuh serta mengetahui masyarakat lainnya. Kebijakan pendidikan harus mencukupi keragamannya tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya lokal dan dirancang agar tidak menyebabkan pengucilan sosial.

b. Perubahan dari kohesi sosial ke partisipasi demokratis.

Kohesi atau keterpaduan sosial, tanpa meninggalkan nilai-nilai baik yang berkembang, harus mampu mengembangkan partisipasi individu secara demokratis. Interaksi sosial yang baik dengan penuh saling pengertian dibutuhkan dalam berkehidupan demokratis di masyarakat dan dunia kerja. Partisipasi demokratis membutuhkan pendidikan dan praktik berkewarganegaraan yang baik.

c. Dari pertumbuhan ekonomi ke pengembangan kemanusiaan.

Pertumbuhan ekonomi diperlukan namun tidak terlepas dari pengembangan kemanusiaan. Investasi untuk menumbuhkan

perekonomian harus inklusif terhadap pengembangan masyarakatnya (aspek sosial) dan lingkungan hidupnya (aspek ekologi).[9]

3) Asas pengembangan pendidikan:

Empat pilar pendidikan UNESCO (*learning to know, Learning to do, learning to be dan learning to live together*).

a. *Learning to know*

Pembelajaran mengandung makna di antaranya untuk belajar dan menemukan, untuk memahami lingkungan seseorang, untuk berfikir secara rasional dan kritis, untuk mencari pengetahuan dengan metode ilmiah, dan untuk mengembangkan kebebasan dalam mengambil suatu keputusan.

b. *Learning to do*

Pembelajaran di antaranya adalah untuk mengembangkan practical- know-how ke kompetensi, mempraktekkan apa yang sudah dipelajari, mengembangkan kemampuan untuk mentransformasi pengetahuan ke dalam inovasi-inovasi dan penciptaan lapangan pekerjaan; Pembelajaran tidak lagi terbatas untuk pekerjaan tetapi merupakan respon dari partisipasi dalam perkembangan sosial yang dinamis; Pembelajaran adalah untuk mengembangkan kemampuan komunikasi, bekerja dengan lainnya serta untuk mengelola dan mencari pemecahan konflik; Pembelajaran adalah untuk mengembangkan kemampuan yang

---

[9] Tim Kurikulum dan Pembelajaran Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. 2014. *Buku Kurikulum Perguruan Tinggi*. www.kopertis12.or.id diakses pada 15 Juli 2015.

merupakan campuran dari higher skill, perilaku sosial, kerja tim dan inisiatif/kesiapan untuk mengambil risiko.

c. *Learning to be*

Pembelajaran di antaranya adalah untuk mengembangkan pikiran dan fisik, intelegensia, sensitivitas, tanggung jawab dan nilai-spiritual; mengembangkan mutu imajinasi dan kreativitas, pengayaan personalitas; Mengembangkan potensi diri untuk membuka kemampuan yang tersembunyi pada diri manusia, dan dalam waktu bersamaan terjadi konstruksi interaksi sosial.

d. *Learning to live together*

Pembelajaran mengandung makna di antaranya untuk menghormati keragaman, memahami dan mengerti diri seseorang, terbuka atau receptive terhadap yang lainnya; Pembelajaran adalah untuk mengembangkan kemampuan untuk memecahkan perbedaan pendapat melalui dialog, selalu perhatian dan berbagi, bekerja dengan tujuan yang jelas dalam kehidupan bermasyarakat, dan mengelola serta memecahkan konflik.[10]

4) Peran Pendidikan Tinggi dalam Menghadapi Mea

Arah pengembangan pendidikan:

a. Adanya kesatuan dari pendidikan dasar sampai ke perguruan tinggi.

Pendidikan dasar adalah sebagai “passport” untuk kehidupan seseorang, dan pendidikan menengah adalah sebagai perantara

---

[10] Tim Kurikulum dan Pembelajaran Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. 2014. *Buku Kurikulum Perguruan Tinggi*. www.kopertis12.or.id diakses pada 15 Juli 2015.

jalan untuk menentukan kehidupan. Pada tahapan ini isi pembelajaran harus dirancang untuk menstimulasi kecintaan terhadap belajar dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pendidikan tinggi adalah untuk menyediakan peluang terhadap keinginan masyarakat untuk belajar sepanjang hayat.

b. Peran perguruan tinggi antara lain:

1) Sebagai lembaga ilmiah dan pusat pembelajaran dimana mahasiswa mendapatkan pembelajaran teori dan penelitian aplikatif.
2) Sebagai lembaga yang menawarkan kualifikasi pekerjaan dengan menggabungkan pengetahuan tingkat tinggi dan keterampilan yang terus disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja.
3) Sebagai tempat untuk belajar sepanjang hayat, membuka pintu bagi orang dewasa yang ingin melanjutkan studi atau untuk beradaptasi terhadap perkembangan pengetahuan, atau untuk memenuhi keinginan belajar di semua bidang kehidupan.
4) Sebagai mitra dalam kerjasama internasional untuk memfasilitasi pertukaran dosen dan siswa sehingga tercipta pembelajaran yang terbaik dan tersedia secara luas bagi masyarakat.[11]

---

[11] Tim Kurikulum dan Pembelajaran Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. 2014. *Buku Kurikulum Perguruan Tinggi*. www.kopertis12.or.id diakses pada 15 Juli 2015.

Sebagai calon tenaga kerja terdidik, mahasiswa yang harus memiliki kemampuan dalam menyongsong persaingan di MEA 2015. Tidak main-main, persaingan yang terjadi melibatkan SDM dari negara-negara ASEAN. Hal ini mestinya menjadi cambuk bagi mahasiswa untuk belajar dengan baik, mempersiapkan semua kemampuan agar dapat berkompetisi dengan tenaga kerja dari negara lain. Mahasiswa dan pihak lembaga pendidikan tinggi harus mempersiapkan diri dengan baik.untuk menghasilkan output yang berkualitas.

BAB III
PROFIL SEKOLAH PASCASARJANA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

A. Sejarah Singkat

Sejarah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN, sebelumnya bernama IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Syarif Hidayatullah Jakarta sisirikan pada tahun 1982, dengan nama Fakults pascasarjana, berdasarkan Surat keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (Dirjen Binbaga Islam) Depatemen Agama R.I.H.Anton Timur Djaelani MA, No. KEP/E/422/81.

Keputusan tersebut menyatakan bahwa IAIN Jakarta telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Program Pascasarjana. Surat keputusan Dirjen Binbaga Islam itu diperkuat oleh Surat Keputusan Menteri Agama No. 78 Tahun 1982 yang berisi ketetapan tentang pembukaan Fakultas Pascasarjana pada IAIN Jakarta dan mengangkat Prof. Dr. Harun Nasution sebagai Dekan.

Pada tahun 1992 nama Fakultas Pascasarjana diubah menjadi Program Pascasarjana dan jabatan Dekan sebagai pimpinan diubah menjadi Direktur Program Pascasarjana.

Pendirian Program Pascasarjan merupakan tuntutan kemajuan dan dinamika pendidikan Islam Indonesia. Program Pascasarjana pada awalnya didirikan terutama dengan tujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas akademik dosen agama Islam pada perguruan tinggi terutama dosen-dosen IAIN. Sejalan denga tuntutan tersebut, Program Pascasarjan IAIN Jakarta pada mulanya diselenggarakan sebagai proyek Departemen Agama yang bertujuan meningkat Kualitas dosen Perguruan Tinggi Agama Islam dan dosen Agama Islam pada Perguruan tinggi Umum (PTU) Negeri.

Peserta Program Pascasarjana IAIN Jakarta pad awalnya (tahun akademik 1982/1983) adalah dosen-dosen yang berasal dari berbagai IAIN di Indonesia, namun sejak tahun akademi 1985/1986 Program Pascasarjana IAIn Jakarta menerima peserta dari tenaga pengajar matakuliah Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum (PTU) Negeri, dan sejak tahun 1990/1991 menerima peserta dari tenaga pengajar agama Islam di Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta. Selain itu Program pascasarjana IAIN Jakarta menerima Mahasiswa dari luar Negeri, dari lembaga-lembaga dalam negeri, alumni IAIN atau perguruan tinggi lainnya selama persyaratan akademik dapat dipenuhi.

Dalam membicarakan sejarah Program Pmascasarjan UIN Jakarta penting dikemukakan peranan Prof. Dr. Harun Nasution. Pendirian Program Pascasarjana IAIN Jakarta merupakan ide dan pemikirannya sejak ia menjabat sebagai Rektor IAIN Jakarta. Meliau menekankan pentingnya menyelenggarakan Pengkajian Islam secara komrehensif, mendalam dan rasional sehingga dapat melahirkan ulama yang mampu berijtihad untuk menjawab masalah-masalah yang timbul pada zamannya. Ide ini mendapat respon positif dari para pendiri dan civitas akademika IAIN Jakarta. Dukungan yang besar juga datang dari menteri Agama pada saat itu (1978-1982), Prof. Dr. A. Mukti Ali. Ide dan pikiran Harun Nasution dilaksanakannya dengan mendirikan Program Pascasarjana IAIN Jakarta sebagai Program Pascasarjana yang pertama di lingkungan IAIN di Indonesia. Sesudah itu berdiri pula Program Pascasarjana IAIN Yogyakarta yang di pimpin oleh Prof. Dr. Mukti Ali.

Arah pengembangan Program Pascasarjana IAIN Jakarta dirumuskan dan diletakan dasar-dasarnya oleh Prof. Dr. Harun Nasution dengan mendirikan program Studi Pengkajian Islam. Program Studi ini selanjutnya dikembangkan sebagai bidang konsentrasi, mengacu kepada pembidangan ilmu agama islam yang berlaku ketika itu (ditetapkan dalam SK Menteri

Agama), yang meliputi Pemikiran Islam, Syariah, Tafsir-Hadis, Dakwah, Pendidikan Islam, Sejarah dan Kebudayaan Islam, Bahasa dan Sastra Arab, dan Perkembangan Modern dalam Islam.

Pada awal berdirinya Program Pascasarjana IAIN Jakarta menyelenggarakan suatu Program studi tingkat Magister yaitu Program studi “Pengkajian Islam” (*Dirasat Islamiyah atau Islamic Studies)*. Pada tahun 1996/1997 dibuka konsentrasi syariah, dan pada Tahun 1997/1998 dibuka empat konsentrasi lain, yaitu Pemikiran Islam, Tafsir dan Hadis, Sejarah dam Peradaban Islam, dan Islam Modernitas. Pada tahun 1988/1999 dibuka tiga konsentrasi lagi, yaitu Pendidikan Islam, Bahasa dan Sastra Arab, dan Dakwah dan Komunikasi. Dalam pekembangan selanjutnya (tahun 1999/2000) konsentrasi Islam dan Modernitas digabungkan ke dalam konsentrasi yang ada, dan dibuka satu konsentrasi lagi yaitu Ekonomi Islam.

Program Doktor dibuka pada tahun 1984 dengan program studi Pengkajian Islam. Mulai tahun akademik 1998/1999 dibuka konsentrasi Syari’ah dan pada tahun berikutnya dibuka pula konsentrasi Tafsir Hadis, Pemikiran Islam, dan sebagainya sebagai kelanjutan dari program studi

yang dibuka pada tingkat Magister yang telah menghasilkan lulusannya.

Pada tahun 1999 Program Magister mulai diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan memperoleh peringkat unggul berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 025/Ban-PT/Ak-I/52/IX/2000 tertanggal 19 Desember 2000. Reakreditasi berikutnya dilakukan pada tahun 2008 dengan hasil Akreditasi A. Program Doktor diakreditasi tahun 2010. Hasil Akreditasinya juga A (sangat Baik) berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.002/BAN-PT/Ak-IX/S3/VI/2010 tertanggal 11 Juni 2010.

Sejak berdirinya pada tahun 1982, Program Pascasarjana dipimpin oleh Prof. Dr. Harun Nasution. Ini berlangsung sampai wafatnya pada tahun 1998. Dalam masa kepemimpinan itu beliau dibantu oleh Dr. Nizamuddin Jr (Alm) (Sekretaris Pascasarjana, 1981-1983). Dr. Yunan Yusuf (Sekretaris Pascasarjana, tahu 1983-1985), Dr. Salman Harun (Sekretaris Pascasarjana tahun 1985), Dr. R. H. A. Suminto (Alm), Dr. Abdul Aziz Dahlan (Asisten Drektur I, tahun 1992-1997), Dr. A. Wahib Mu'thi (Asisten Direktur II, tahun 1995-1997, Asisten Direktur I Tahun 1997-1999), dan Dr. Suwito (Asisten Direktur II, 1997-1999).

Setelah ke[emimpinan Prof. Dr. Harun Nasution, Direktur Program Pascasarjana dijabat oleh Prof. Dr. Said Agil Husin Al-Munawar, MA. Dalam masa kepemimpinannya ditetapkan adanya Dewan Pertimbangan Akademik (dipimpin oleh Dr. Bahtiar Effendy) dan ketua-ketua konsentrasi, yang meliputi Syari'ah (Dr. H. Satria Efendi M. Zein, M.A. wafat tahun 2000 digantikan oleh Dr..H. Muhammad Masyhoeri Na'im, MA.), Pemikiran Islam (Dr. H. Muslim Nasution samapai tahun 2004, lalu digantikan oleh Prof. Dr. H. Abdul Aziz Dahlan), Tafsir dan Hadis (Prof. Dr. H. Said Agil Husin al-Munawar, M.A. dan Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya, M.A.), Sejarah Peradaban Islam (Prof. Dr. Badri Yatim, MA0, Pendidiakan Islam (Prof. Dr. Suwito, MA), Bahasa dan Sastra Arab (Prof. Dr. H. D. Hidayat, M.A), Dakwah dan Komunikasi (Prof. Dr. H, M. Yunan Yusuf) dan Ekonomi Islam (Dr.Ir. Murasa Sarkaniputra).

Pada bulan Desember 2004, jabatan Direktur Program Pascasarjan beralih kebawah pimpinan Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, dibantu oleh Dr. Fuad Jabali, MA., sebagai Asisten Direktur I (Bidang Akademik), dan Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya, MA., sebagai Asisten Direktur II (Bidang Umum dan Keuangan). Selanjutnya struktur Ketua konsentrasi ditiadakan, dan struktur DPA diperkuat.

Mulai tahun 2007, Program Pascasarjana berubah nama menjadi Sekolah Pascasarjan. Perubahan ini dimaksudkan agar pendidikan Pascasarjana bukan *ad hoc* melainkan menjadi lembaga pendidikan yang eksis. Sekolah Pascasarjan mulai tahun 2007 dipimpin oleh Prof. Dr. Azumardi Azra, M.A. sebagai Direktur, Dr. Fuad Jabali, MA. Sebagai Deputi Direkktur Akademik dan Kerjasama, Dr. Sri mulyati, MA sebagai Deputi Direktur Administrasi dan kemahasiswaan, dan Prof. Dr. Suwito, MA sebagai Deputi Direktur bagian Pengembanagn Kelembagaan. Mulai tahun 2008 Dr. Sri Mulyati, MA digantikan oleh Dr. Udjang Tholib, MA.

Pada masa ini, Sekolah Pascasarjana melakukan beberapa kebijakan baru antara lain;

1) Perubahan nama menjadi Sekolah Pascasarjana.
2) Perubahan nama Asisten Direktur menjadi Deputi Direktur, yaitu sebelumnya hanya 2 Asisten Direktur sekarang menjadi 3 Deputi Direktur.
3) Pemberlakuan kurikulum baru bagi program regular yang sebelumnya konsentrasi diposisikan sebagai Program Studi dikembangkan posisinya sebagai Konsentrasi/permintaan studi.

4) Nama dan substansi mata kuliah bersifat interdisipliner sehingga memunginkan diambil oleh mahasiswa dari berbagai bidang dan para dosennya juga berasal dari berbagai bidang dan diwujudkan dalam bentuk *team teaching.*
5) Penerapan jalur tesis dan non-tesis untuk program Magister dan penerapan gelar *Master of Philosophy* (M.Phil).
6) Peningkatan pelayanan terhadap mahasiswa untuk percepatan penyelesaian studi. Wujud kebijakan ini antara lain berupa maksimalisasi fungsi dosen Penasehat Akademik (PA), Pembimbing Tesis dan Disertasi di samping percepatan pelayanan bidang administrasi.

Mulai Maret 2009 diberlakukan ketentuan baru tentang kurikulum untuk Program Magister dan Program Doktor dengan menambah bobot Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Arab, pendidikan Agama Islam, Psikologi, dan Agrabisnis (Sosial Ekonomi Pertanian) di Fakultas-Fakultas.

Mulai 2011 kepemimpinan Sekolah Pascasarjan terdiri atas Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA (Direktur), Prf. Dr. Suwito, MA. (Deputi Direktur Akademik dan Kerjasama), Dr. Yusuf Rahman, MA (Deputi Direktur Administrasi dan

Kemahasiswaan) dan Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, MA (Deputi Direktur Pengembangan Kelembagaan).

Sampai dengan 31 Agustus 2011, Sekolah Pascarjana telah menghasilkan 1917 Magister dan 836 Doktor.[28]

B. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

1. Visi

Mengintegrasikan keislaman, keilmuan, keindonesiaan dan kemanusiaan untuk mengantarkan UIN Syraif Hidayatullah Jakarta menjadi *International research university* tahun 2015

2. Misi

a. Mengembangkan ilmu dan keahlian terbaik berbasis riset di Indonesia, untuk Islam dan Dunia
b. Mengembangkan ilmu-ilmu keislaman tingkat tinggi berdasar pada pemahaman yang komprehensif terhadap realitas Indonesia dan dunia
c. Mengembangkan ilmu-ilmu social, alam dan eksakta dan mengintegrasikan ilmu-ilmu tersebut dengan studi keislaman.

---

[28] Pedoman Akademik Program Magister dan Doktor Pengkajian Islam 2011 – 2015 (Jakarta: UIN Syahida, 2011), 1-4.

3. Tujuan

Menghasilkan Magister dan Doktor Pengkajian Islam yang memiliki pemahaman dan wawasan keislaman yang komprehensif, mempunyai keahlian dalam pengembangan ilmu agama Islam sesuai bidang yang diketahui, kesadaran ilmiah yang tinggi, terbuka dan reponsif terhadap perubahan sosial, dan berakhalak mulia.

4. Sasaran

1) Menghasilkan lulusan yang selesai tepat waktu sekurang-kurangnya 70% untuk Program Magister dan >50% untuk Program Doktor.
2) Setiap tahun menghasilkan sekurang-kurangnya 25 tesis dan 15 disertasi yang dipublikasikan oleh penerbit kredibel.
3) Sekurang-kurangnyab 50% hasil penelitian karya tulis ilmiah mahasiswa dan dosen dikutip oleh masyarakat akademik Internasional.[29]

---

[29] Pedoman Akademik Program Magister dan Doktor Pengkajian Islam 2011 – 2015 (Jakarta: UIN Syahida, 2011), 5.

C. Program Studi dan Gelar Akademik

1. Jenjang Pendidikan

Jenjang pendidikan yang diselenggarakan di Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta adalah jenjang Magister dan Doktor bidang Pengkajian Islam

2. Program Studi Dan Konsentrasi

Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memiliki program Studi pengkajian Islam (*Dirasat Islamiyyah/ Islamic Studies*) untuk program Magister dan program Doktor.

Konsentrasi/permintaan/Keahlian Program Studi meliputi: pemikiran Islam (Teologi, Filsafat, dan Tasawuf); Pendidikan Islam; Syariah-Fiqh; Sejarah-Peradaban; Bahasa-Sastra Islam; Tafsir Interdisiplin; hadis dan Tradisi Kenabian; dakwah Islamiyah; Ekonomi Syariah; Manajemen Perbankan dan Keuangan Syariah; Psikologi Islam; Studi Agama-Agama; Kajian Islam Gender; Islam Studi Perdamaian; Studi kawasan Islama; Arsitektur-Tata Ruang Islam; Studi Manuskrip Islam; Filologi Islam Indonesia; Ekologi Islam; Islam Minoritas; Sosiologi-Antropologi Masyarakat Islam; Kajian Hubungan Intara dan Antar Agama; Interdisciplinary Islamic Studies; Agama dan Politik; Agama dan Sains; Islam dan Kependudukan; Agama dan Media; analisis Produk Halal; Agama dan Kesehatan; Agama dan Kedokteran; Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM); Seni Budaya Islam; Islam dan

Diplomasi; Agama dan Kewirausahaan; Agama dan Sumber Daya Lingkungan.

Konsentrasi/Permintaan studi Mahasiswa terutama tercermin pada Tesis atau Disertasinya.

3. Akreditasi Program Studi

Program Studi Magister berakreditasi A (Nilai 4,7/sangat Baik) dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi berdasarkan SK. No.018/BAN-PT/Ak-VI/S2/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008. Status Akreditasi Program Magister ini berlaku sampai dengan 19 Desember 2013.

Program Studi Doktor memperoleh Akreditasi A (Nilai4,7/sangat baik) dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) No. 002/BAN-PT/Ak-IX/S3/VI/2010 tanggal 11 Juni 2010. Status akreditasi Program Doktor ini berlaku sampai dengan 11 Juni 2015.

4. Gelar Akademik

Sekolah Pascasarjana memberikan gelar akademik Magister Agama (MA), jalur tesis (by thesis) dan jalur non tesis (by course work), Master Philosophy (M.Phil), dan Doktor (DR).

Selengkapnya gelar akademik yang ada adalah sebagai berikut:

No	Singkatan	Sebutan	Bidang Keilmuan/Konsentrasi
1.	MA. Ked	Magister Agama Bidang Kedokteran	Agama dan Ilmu-ilmu Kedokteran
2.	MA. Kes	Magister Agama bidang Kesehatan	Agama dan Ilmu-ilmu Kesehatan
3.	MA. Hum	Magister Agama Bidang Humaniora	Agama Dan Sastra, Sejarah, Bahasa, Ushuluddin, (Teologi, Filsafat, Tasawuf), Tafsir Indterdisiplin, Hadis dan Tradisi Kenabian, Dakwah, Studi Agama-Agama, Kajian Wanita/ Jender, Studi Perdamaian, Studi manuskrip Islam, Filologi, Islam Minoritas, Kajian Hubungan Intra dan Antar Agama, *Interdisciplinary Islamic Studies,* Seni Budaya.
4.	MA. Si	Magisten Agama bidang Sains	Agama dan Ilmu-ilmu Sosial, lingkungan, Perpustakaan, Sosiologi, Psikologi, Matematika, IPA, Teknologi, Arsitektur, Tata Ruang, Ekologi, Kependudukan, Analis Produk Halal, Media Komunikasi.
5.	MA.Pd.	Magister Agama Bidang Pendidikan	Agama dan Ilmu Pendidikan
6.	MA.Pol.	Mgister Agama	Politik, Studi Wilayah,

No	Singkatan	Sebutan	Bidang Keilmuan/Konsentrasi
		Bidang Politik	Hubungan Internasional, Ketahanan Nasional, Diplomasi.
7.	MA.Hk	Magister Agama bidang Hukum	Agama dan Ilmu-ilmu Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Syari'ah.
8.	MA.Ek	Magister Agama bidang Ekonomi	Agama dan Ilmu-ilmu Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Bisnis, Perbankan.
9.	M.Phil	Master of Philosophy	Semua bidang Keahlian/ konsentrasi sebagai terminal ke Program Doktor
10.	Dr.	Doktor	Semua bidang Keahlian/Konsentrasi.

D. Sistem Pendidikan

1. Orientasi Studi

a. Semua mahasiswa baru wajib mengikuti orientasi studi diawal semester dan kehadirannya dinilai sebagai kehadiran perkuliahan.

b. Orientasi studi berisi kegiatan yang mengantarkan para mahasiswa untuk lebih memahami kampus secara lebih baik dan memberikan wawasan yang luas dan pasti dalam memahami dan mengembangkan keahlian atau konsentrasi yang dipilihnya.

c. Materi orientasi program studi orientasi kelembagaan, akademik, keahlian, kiat mengakses sumber-sumber

internasional dan kiat penyelesaian studi. Mahasiswa juga dilatih membuat proposal Tesis dan Disertasi mini untuk memacu agar lebih fokus.

d. Dalam orientatasi studi semua mahasiswa baru dipertemukan dengan Dosen Koordinator atau Penasehat Akademik.

2. Struktur Kurikulum

a. Struktur Kurikulum untuk Program Magister meliputi Mata Kuliah Wajib, Matakuliah Pilihan, Mata Kuliah Prasyarat (Bahasa Arab, Bahasa Inggris, dan Mata Kuliah tambahan sebagai Matrikulasi), keahlian Komprehendif, seminar Proposal Tesis, Proposal Tesis, *Work In Progres* Tesis, Pendahuluan Tesis, dan Tesis (Promosi Magister).

b. Struktur Kurikulum Untuk Program Doktor meliputi Mata KuliahWajib, Mata Kuliah Pilihan, Mata Kuliah Prasyarat (Bahasa Arab, Bahasa Inggris, dan Mata Kuliah tambahan sebagai Matrikulasi), keahlian Komprehendif, seminar Proposal Disertasi, Proposal Disertasi, *Work In Progres* Disertasi, Pendahuluan Disertasi, dan Disertasi (Promosi Doktor).

c. Jenis-jenis ujian untuk penyelesaian studi Program Magister dan Doktor adalah Ujian Matakuliah (Mata Kuliah Wajib, Pilihan, Prasyarat), seminar Proposal, Ujian Proposal, Ujian Komprehensif, *Work In Progress,* Ujian Pendahuluan, dan Ujian Promosi Tesis dan Disertasi.

d. Yang dicantumkan dalam transkrip akademik meliputi semua nama matakuliah (Wajib, pilihan dan Prasyarat) yang pernah diambil dan lulus serta semua tahapan kegaitan akademik lain (seminar proposal, ujian proposal, ujian keahlian komprehensif, ujian *Work in Progress,* ujian pendahuluan dan ujian promosi), status program (tessis atau non-tesis), atau jika sampai kepada penyelesaian Tesis dan Disertasi maka ditulis Judulnya.

e. Transkrip akademik untuk program *Doctor by Research* berisi mata kuliah yang diambil, komponen akademik lain dan disertasi yang bobot sks-nya sama dengan program Doktor lainnya.

3. Tabel Struktur Kurikulum

a. Struktur Kurikulum Program Magister (Jalur Tesis)

No.	Komponen		
1.	Mata Kuliah Wajib		8 sks
	A. Kajian Islam Komprehensif	4 sks	
	B. Pendekatan dan Metodologi Studi Islam	4 sks	
2.	Mata Kuliah pilihan		12 sks
3.	Ujian keahlian Komprehensif		4 sks
4.	Seminar Penulisan Karya Ilmiah/Proposal Tesis		4 sks
5.	Ujian proposal tesis		4 sks
6.	Work in Progress Tesis		4 sks
7.	Ujian pendahuluan Tesis		4 sks
8.	Ujian Promosi Magister		6 sks
	Jumlah		46 sks

Catatan:

Kemampuan berbahasa Asing (arab dan inggris) bagi orang Indonesia tidak menjadi bagian kurikulum tetapi merupakan prasyarat masuk dan kelulusan. Kemampuan baerbahasa Indonesia bagi Mahasiswa International tidak menjadi bagian kurikulum tetapi merupakan prasyarat masuk dan kelulusan.

b. Struktur Kurikulum Program Magister (Jalur Non Tesis)

No.	Mata Kuliah		
1.	Mata Kuliah Wajib		8 sks
	A. Kajian Islam Komprehensif	4 sks	
	B. Pendekatan dan Metodologi Studi Islam	4 sks	
2.	Mata Kuliah pilihan		12 sks
3.	Mata Kuliah Pilihan Tanmbahan		16 sks
4.	Seminar Penulisan Karya Ilmiah/Proposal Tesis		4 sks
5.	Tugas Akhir dan Ujian Keahlian Komprehensif		4 sks
	Jumlah		44 sks

Catatan:

- Kemampuan berbahasa Asing (arab dan inggris) bagi orang Indonesia tidak menjadi bagian kurikulum tetapi merupakan prasyarat masuk dan kelulusan. Kemampuan baerbahasa Indonesia bagi Mahasiswa International tidak menjadi bagian kurikulum tetapi merupakan prasyarat masuk dan kelulusan.

- Mata Kuliah Pilihan Tambahan adalah Mata Kuliah yang diambil setelah resmi dinyatakan sebagai peserta Program Magister Jalur Non Tesis.

c. Struktur Kurikulum Program Master Of Philosophy

1.	Mata Kuliah Wajib		8 sks
	A. Kajian Islam Komprehensif	4 sks	
	B. Pendekatan dan Metodologi Studi Islam	4 sks	
	C. Metodologi Penelitian Studi Islam	4 sks	
2	Mata Kuliah Pilihan		8-16 sks
3.	Seminar Penulisan Karya Ilmiah/Proposal Disertasi		4 sks
4.	Tugas Akhir dan Ujian Keahlian Komprehensif		6 sks
	Jumlah		30 sks

Catatan:

Kemampuan berbahasa Asing (arab dan inggris) bagi orang Indonesia tidak menjadi bagian kurikulum tetapi merupakan prasyarat masuk dan kelulusan. Kemampuan baerbahasa Indonesia bagi Mahasiswa International tidak menjadi bagian kurikulum tetapi merupakan prasyarat masuk dan kelulusan.

d. Struktur Kurikulum Program Doktor

No.	Mata Kuliah		sks
1.	Mata Kuliah Wajib		4-12 sks
	A. Kajian Islam Komprehensif	4 sks	
	B. Pendekatan dan Metodologi Studi Islam	4 sks	
	C. Metodologi Penelitian Studi Islam	4 sks	
2.	Mata Kuliah Pilihan		8-16 sks
3.	Keahlian Komprehensif		6 sks
4	Seminar Penulisan Karya Ilmiah/Proposal Disertasi		4 sks
5.	Ujian proposal Disertasi		6 sks
6	*Work In Progress* Disertasi		4 sks
7.	Ujuan pendahuluan Disertasi		8 sks
8.	Ujian Proposal Doktor		10 sks
	Jumlah		58 sks

Catatan:

1. Jika Kuliah 1A dan 1B sudah diambil pada Program Magister maka digantikan dengan Mata Kuliah Pilihan.
2. Kemampuan berbahasa Asing (arab dan inggris) bagi orang Indonesia tidak menjadi bagian kurikulum tetapi merupakan prasyarat masuk dan kelulusan. Kemampuan baerbahasa Indonesia bagi Mahasiswa International tidak menjadi bagian kurikulum tetapi merupakan prasyarat masuk dan kelulusan.

e. Struktur Kurikulum Program Doctor Research

No.	Komponen	sks
1.	Mata Kuliah Wajib	0 sks
2.	Mata Kuliah Pilihan	0 sks
3.	Ujian proposal Disertasi	0 sks
4	Ujian Keahlian Komprehensif	0 sks
5.	*Work In Progress* Disertasi	0 sks
6	Ujuan pendahuluan Disertasi	0 sks
7.	Ujian Proposal Doktor	0 sks
	Jumlah	0 sks

Catatan

1. Kemampuan berbahasa Asing (arab dan inggris) bagi orang Indonesia tidak menjadi bagian kurikulum tetapi merupakan prasyarat masuk dan kelulusan. Kemampuan berbahasa Indonesia bagi Mahasiswa International tidak menjadi bagian kurikulum tetapi merupakan prasyarat masuk dan kelulusan.
2. Wajib mengambil minimal 2 Mata kuliah Matrikulasi bagi yang berlatar belakang pendidikan non Pengkajian Islam.

4. Beban Studi dan Komponen Mata Kuliah

a. Beban Studi Program Magister Jalur Tesis adalah 46 sks, yang dijadualkan untuk 4 semeter dan dapat

ditempuh dalam waktu kurang dari 4 semester dan selama-lamanya 8 semseter termasuk penyusunan Tesis.

b. Beban Studi Program Magister Jalur *By Cours Work* (Non Tesis) adalah 46 sks.
c. Beban Studi Program *Master of Philosophy* (M.Phil) adalah 30 sks.
d. Beban Studi Program Doktor adalah 58 sks yang dijadualkan untuk 4 semster dan selama-lamanya 10 semester, termasuk penyususnan Disertasi.
e. Beban Studi Program *Doktor by Research* diberikan bobot 0 sks
f. Komponen mata kuliah dan ujian program 1 s/d 5 di atas secara detail lihat pada contoh transkrip akademik.
g. Peserta Program Magister dan Doktor yang berlatar belakang pendidikan non kajian Islam berkewajiban mengambil 2 Mata Kuliah tambahan sebagai matrikulasi.
h. Peserta program Magister dan Doktor yang kurang memenuhi syarat secara penuh tetapi dapat dipertimbangkan untuk diterima, berkewajiban memnuhi beban akademik tambahan sesuai dengan keputsan pimpinan termasuk pengawasan khusus dalam tahun pertama masa studi. Hasil evaluasi terhadap pengawasan ini dapat berupa pemutusan studi jika memenuhi persyaratan.

5. Matakuliah Berbahasa Asing

a. Mahasiswa Program Magister melalui semester Gasal 2011/2012 diwajibkan lulus dalam 1 Mata Kuliah yang mengguanakan pengantar Bahasa Arab dan 1 Mata Kuliah yang menggunakan pengantar Bahsa Inggris.
b. Mahasiswa Program Doktor mulai Semester Gasal 2011/2012 diwajibkan lulus dalam 3 mata kuliah berbahasa asing, yaitu 1 atau 2 mata kuliah berbahasa Arab dan 1 atau 2 mata kuliah berbahasa Inggris.

6. Mata Kuliah Wajib

a. Mata Kuliah wajib adalah mata kuliah yang wajib diambil seluruh mahasiswa Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, baik Program Magister atau Doktor pada semua Program Studi.
b. Mata Kuliah Wajib untuk program Magister adalah mata kuliah “kajian Islam Komprehensif”, “Pendekatan dan Metodologi Studi Islam”;
c. Mata Kuliah Wajib untuk Program Doktor adalah Mata Kuliah “kajian Islam Komprehensif”, “Pendekatan dan Metodologi Studi Islam”; dan “Metodologi Penelitian Studi Islam”.
d. Program Doktor yang telah mengambil Mata Kuliah “kajian Islam Komprehensif”, “Pendekatan dan Metodologi Studi Islam” pada Program Magister,

diwajibkan mengambil minimal 2 mata Kuliah lain yang fungsinya menjadi mata kuliah pilihan.

7. Matakuliah Pilihan

a. Program Magister

1) Mata Kuliah pilihan adalah mata kuliah yang ditawarkan di luar mata kkuliah wajib.
2) Mata Kuliah Pilihan bagi program Magister adalah 3 (Tiga)
3) Mahasiswa yang mengambil Program non Tesis (*by course work*) wajib mengambil 4 mata kuliah pilihan tambahan.

b. Program Doktor

1) Mata kuliah pilihan bagi program Doktor yang pernah mengambil mata kuliah Kajian Islam Komprehensif (KIK) dan Pendekatan dan Metodologi Studi Islam (PMSI) pada program Magister adalah 4 mata kuliah. Dengan demikian jumlah Mata kuliah wajib dan mata Kuliah pilihan adalah 5
2) Mata kuliah bagi Program Doktor yang belum pernah mengambil Mata Kuliah KIK dan PMSI adalah 2 Mata kuliah
3) Mata kuliah pilihan yang diambil program Magister tidak diperbolehkan lagi ambil di Program Doktor.

8. Mata Kuliah Matrikulasi

a. Mahasiswa Program Magister dan/atau Doktor yang berlatar belakang pendidikan non Kajian Islam diwajibkan mengambil dan lulus mata kuliah Matrikurlasi.
b. Mata Kuliah Matrikulasi dapat diambil pada jenjang Sarjana (S1) atau jenjang pascasarjana. Pengambilan Mata Kuliah Matrikulasi pada jenjang Sarjana (S1) wajib berkoordinasi dengan Sekolah Pascasarjana dan Fakultas serta Program Studi terkait.
c. Mata Kuliah Matrikulasi ditetapkan oleh pimpinan.
d. Kewajiban dan/atau pembebaasan Mata Kuliah Matrikulasi dicantumkan dalam form/berita acara yang disediakan.
e. Mata Kuliah Matrikulasi adalah 2 Mata Kuliah.
f. Mata Kuliah Matrikulasi dicantumkan dalam transkrip akademik dengan bobot 0 (nol) sks .

9. Remedial Bahasa

a. Kemampuan bebahasa Arab (TOAFL) dana bahasa Inggris (TOEFL) merupakan prasyarat masuk dan keluar bagi Program Magister dan Doktor untuk semua jalur (Magister Jalur Tesis dan Non Tesis, *M.Phil, Doktor By Research* dan *Doktor*).
b. Mahasiswa Program Magister yang tidak memenuhi Skor TOAFL dan/atau TOEFL minimal 450, dan

mahasiswa Program Doktor yang tidak memenuhi skor TOAFL dan/atau TOEFl 500, diwajibkan mengikuti kuliah Remedial Bahasa di awal masa Studi di Pusat Bahasa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

c. Mahasiswa yang telah memperoleh skor minimal bagi persyaratan masuk program Magister atau Doktor diberikan sertifikat dari pusat Bahasa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sertifikat ini berlaku sampai dengan masa penyelesaian studi di Program Magister atau Doktor.
d. Mahsiswa yang masih mempunyai beban remedial 2 bahasa (Arab dan Inggris) tidak diperkenankan mengambil mata kuliah secara penuh di awal masa penyelesaian studi program Magister atau Doktor.
e. Kuliah Remedial Bahasa tidak dapat menggantikan posisi perolehan sertifikat TOAFL atau TOEFL melainkan hanya sarana bagi mahasiswa untuk membantu perolehan kedua sertifikat tersebut. Remedial Bahasa diarahkan agar para Mahasiswa mampu memperoleh kemampuan bahasa Arab da/atau Inggris sampai skor tertentu sesuai yang disyaratkan.
f. Perkuliahan Remedial Bahasa diselenggarakan selama 1 semester (Semester 1) bekerjasama dengan Pusat Bahsa UIN Jakarta. Mahasiswa yang tidak mencapai skor minimal yang dipersyaratkan pada masa trsebut, masih

dibebani remedial bahasa di luar koordinasi Sekolah Pascasarjana.

g. Peserta yang telah mengikuti ujian TOEL /TOAFL selama maksimal 2 tahun dan telah memperoleh skor 425 untuk Program Magister dan 475 untuk Program Doktor, dapat menggantinya dengan ujian *Text Comprerhension.*
h. Mata Kuliah Remedial Bahasa dicantumkan dalam transkrip akademik dengan bobot 0 sks.
i. Mahasiswa Internasional diwajibkan mampu memahami bahasa Indonesia yang dapat diperoleh melalui perkuliahan remedial.

10. Ujian Keahlian Komprehensif

a. Mahasiswa Program Magister dan Doktor di wajibkan lulus Ujian Keahlian Komprehensif tulis dan lisan.
b. Ujian Keahlian dapat diikuti mahasiswa yang telah Lulus minimal 20 sks Mata Kuliah dan lulus Bahasa Arab dan Inggris.
c. Materi Ujian Keahlian Komprehensif meliputi aspek pemikiran kelembagaan, sejarah, dan perkembangan Islam Modern.
d. Mahasiswa mengajukan pendaftaran Ujian keahlian Komprehensif dengan menyertakan bahan bacaan Ujian Keahlian Komprehensif (lihat contoh pengajuan komprehensif).

e. Pengajuan bahan Ujian Keahlian Komprehensif diverifikasi oleh Tim sebelum pelaksanaan ujian.
f. Teknis pelaksanaan Ujian:
    1) Sebelum Ujian, Mahasiswa mengajukan 3 tema untuk msing-masing aspek materi ujian beserta literature utamanya.
    2) Jumlah literature utama untuk masing-masing tema minimal 10 judul artikel/buku untuk program Magister dan 20 judul artikel/buku untuk Program Doktor.
    3) Pada saat ujian tulis, mahasiswa mengerjakan 1 soal dari 3 yang disediakan untuk masing-masing aspek. Waktu yang disediakan untuk masing-masing soal adalah 2 jam, dan semua ujian diselesaikan dalam 2 hari.
    4) Ujian dilaksanakan seminggu setelah ujian tulis selama 2 jam untuk semua materi.
g. Tim penguji Keahlian Komprehensif lisan terdiri dari atas 2 orang untuk jenjang Magister dan 3 orang untuk Jenjang Doktor.
h. Peserta Program Magister yang 2 kali tidak lulus Ujian Keahlian Komprehensif dapat mengambil jalur non-tesis dan bahan Ujian Keahlian Komprehensif ini dijadikan makalah ilmiah pengganti Ujian Komprehensif serta menambah sejumlah mata kuliah sesuai ketentuan.

i. Peserta program Doktor yang 2 Kali tidak lulus Ujian Keahlian Komprehensif tetapi memenuhi jumlah sks yang ditetapkan dapat diberikan ijazah *Master of Philosophy* (M.Phil.)

11. Seminar Proposal/Karya Ilmiah

a. Semua Mahasiswa Program Magister dan Doktor diwajibkan mengikuti kuliah Seminar Proposal/Karya Ilmiah pada semsester awal.
b. Seminar Proposal/Karya Ilmiah disediakan dalam pengantar bahasa Indonesia, Arab, dan Inggris.
c. Mahasiswa yang tidak lulus Kuliah seminar proposal/Krya Ilmiah tidak diperbolehkan menempuh Ujian Proposal Tesis atar Disertasi.
d. Proposal Tesis atau Disertasi yang Sudah diseminarkan dan dinyatakan lulus tidak berarti lulus puladalam Ujian Proposal Tesis atau Disertasi.
e. Ujian Proposal Tesis dan Dosertasi yang sudah diseminarkan dapat dimajukan kedalam ujian proposal Tesis atau Disertasi.

12. Ujian Proposal

a. Proposal yang dimajukan dalam ujian Proposal dapat berasal dari proposal yang sudah diseminarkan di kuliah Semianr penulisan Karya Ilmiah/Proposal

b. Proposal dapat diujikan setelah lulus verifikasi dari tim yang ditetapkan.
c. Jika 2 kali ujian Proposal tidak lulus maka peserta program Magister dapat dialihkan ke jalur Non-Tesis, dan bagi Program Doktor diberikan Ijazah *Master of Philosophy* (M.Phil).

13. Work In Progres Tesis Dan Disertasi

a. Tesis dan Disertasi dapat diujikan setelah malalui *Work in Progress* sekurang-kurangnya 2 (dua) kali, dengan cara mempresentasikannya di hadapan Tim Penguji.
b. Tesis atau Disertasi dapat diujikan setelah lulus veroifikasi sebelum *Work in Progressr.*
c. Tim *Work in Progress* bertugas memberi komentar dan saran untuk perbaikan penulisan Tesis atau Disertasi, serat member Nilai.
d. Nilai *Work in Progress* Tesis atau Disertasi merupakan akumulasi dari keseluruahn Jumlah *Work in Progress* mahsiswa yang bersangkutan.

14. Ujian Pendahuluan Tesis Dan Disertasi

a. Tesis dan Disertasi yang telah disetujui Pembimbing dapat dimajukan ke Ujian Pendahuluan setelah melalui *Work in Progress* dan verifikasi sebelum ujian Pendahuluan.

b. Tim Penguji Pendahuluan Tesis terdiri atas pembimbing 2 Penguji dan Ketua Sidang yang merangkap Penguji.
c. Tim Penguji Ujian pendahulan Disertasi terdiri atas Guru Besar yang bertindak sebagai Pembimbing, 3 penguji dan Ketua Sidang yang merangkap sebagai penguji.
d. Penguji Tesis dan Disertasi ada yang berasal dari Luar (*external examiner*) dalam hal kelembagaan dan keilmuan.
e. Tesis dan Disertasi yang tidak lulus dalam Ujian Pendahuluan dapat diperbaiki, kemudian diujikan kembali setelah mendapat persetujuan dari tim penguji awal.
f. Apabila Ujian pendahuluan Tesis yang kedua tidak lulus, maka mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan gelar Magister jalur *by Course Work* (Non Tesis).
g. Apabila Ujian Pendahuluan Disertasi yang kedua tidak lulus, maka mahasiswa yang bersangkutan dapar diberikan ijazah *Master of Philosophy* (M.Phil), tetapi tidak diijinkan melanjutkan Program Doktor di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
h. Tesis dan Disertasi yang dinyatakan tidak lulus dalam Ujian Pendahuluan Kedua, setelah perbaikan sesuai komentar dan saran Penguji, dapat dikonversi oleh Tim

menjadi dua mata kuliah dengan bobot 8 sks dan diberi nama sesuai dengan tema Tesis dan Disertasi tersebut.

15. Ujian Promosi Magister

a. Mahasiswa Program Magister yang telah lulus dan memprbaiki Tesisnyanya sesuai catatan dalam Ujian Pendahuluan Tesis dapat menempuh Ujian Proposal Magsiter setelah Naskah Tesis diverifikasi.
b. Ujian Proposal Magsiter dimaksudkan mempromosikan hasil temuan penelitiannya di hadapan publik.
c. Ujian Proposal Magsiter selalu menghasilkan kelulusan, kecuali ada alasan dan bukti kuat untuk tidak meluluskannya seperti adanya plagiarisme.
d. Tim penguji Ujian Proposal Magsiter diusahakan sama dengan Tim Penguji Ujian Pendahuluan Tesis yang bersangkutan.

16. Ujian Promosi Doktor

a. Mahasiswa Program Doktor yang telah lulus dan memprbaiki Disertasinya sesuai catatan dalam Ujian Pendahuluan Disertasi dapat menempuh Ujian Proposal Doktor setela diverifikasi.
b. Ujian Proposal Doktor dimaksudkan mempromosikan hasil temuan penelitiannya di hadapan public.
c. Ujian Proposal Doktor selalu menghasilkan kelulusan, kecuali ada alasan dan bukti kuat untuk tidak meluluskannya seperti adanya plagiarisme.

d. Tim penguji Ujian Proposal Doktor diusahakan sama denga Tim Penguji Ujian Pendahuluan Disertasi yang bersangkutan.

17. Verifikasi Bahan-Bahan Ujian

a. Bahan-bahan Ujian yang meliputi wajib diverifikasi sebelum ujian dilaksanakan meliputi:1) Bahan ujian Keahlian Komprehensif, 2) Makalah/Tugaas Akhir mahasiswa jalur non Tesis, 3) Proposal Tesis dan Disertasi, 4) Bab-bab Tesis dan Disertasi yang akan di *Work in Progress,* 5) Ujia Pendahuluan Tesis dan Disertasi, dan 6) Ujian Promosi Magister dan Doktor.
b. Sedapat mungkin verifikasi dilakukan langsung di hadapan mahasiswa yang bersangkutan sehingga dapat mendiskusikan kelaikan bahan yang akan diujikan.
c. Anggota Tim Verifikasi adalah para dosen yang piket (*standby*) di ruang kerja Dosen.[30]

E. Penawaran Mata Kuliah dan Ujian-Ujian

1. Penawaran dan Pengambilan Mata Kuliah

a. Mata kuliah dengan kode 6000 atau 7000-an dapat diambil oleh mahasiswa Program Magister dab Doktor.
b. Mata kuliah dengan kode 8000-an ahanya boleh diambil mahasiswa Program Doktor.

---

[30] Pedoman Akademik Program Magister dan Doktor Pengkajian Islam 2011 – 2015 (Jakarta: UIN Syahida, 2011), 15-25.

c. Mata kuliah yang berkode 9000-an diperuntukan mata kuliah atau komponen akademik lain yang berkaitan dnegan penulisan karya ilmiah, baik untuk program Magister maupun Doktor.
d. Pada semsester pertama mahasiswa hanya diperbolehkan mengambil maksimum 3 mata kuliah termasik kuliah seminar Proposal Tesis dan Disertasi, tetapi pada semester kedua mahasiswa diperbolehkan mengambil mmaksimum 4 mata kuliah dan atau sesuai ketentuan.
e. Penilaian mata Kuliah agar dapat menampung pengayaan materi Tesis atau Disertasi.
f. Suatu mata kuliah dapat diselenggarakan apabila pendaftar minimal 12 orang dan maksimal 20 orang.
g. Masa perbaikan Kartu Rencana Studi (KRS) dilakukan selambat-lambatnya satu minggu setelah perkuliahan efektif.

2. Ujian Semester

a. Mata kuliah dapat diujikan apabila materinya telah disampaikan paling kurang 12 kali dalam satu semester.
b. Ujian Akhir Semester berupa penulisan makalah dan Ujian Tulis.
c. Selain ujian Akhir Semester, dosen pemegang mata kuliah boleh melakukan Ujian Pertengahan Semester atau Ujian lainnya.

d. Tidak ada ujian ulangan untuk suatu mata kuliah, setelah berlangsung Ujian Akhir Semester.
e. Perbaikan Nilai mata Kuliah hanya dapat dilakukan dengan mengikuti kembali perkuliahan yang sama, sehingga nilai yang pernah diperoleh dengan sendirinya batal. Hal ini dapat dilakukan apabila yang bersangkutan mengajukan surat permohonan dan memperoleh izin dari pimpinan serta terdaftar dalam KRS.
f. Peserta yang berhal mengikuti Ujian Aakhir Semester untuk suatu mata kuliah adalah merekan yang menghadiri 75% dari jumlah kehadiran Dosen.

3. Penialian Mata Kuliah dan Ujian-Ujian

a. Penilaian Mata Kuliah, makalah, Tesis dan Disertasi serta komponen akademik lainnya didasarkan prinsip-prinsip akademik, tidak boleh dipengaruhi oleh perbedaan pemahaman agama, penafsiran, mazhab, jenis kelamin, ras, kewarganegaraan, etnis, status sosial dan subyektif lainnya.
b. Penialain terhadap prestasi belajar dalam suatu mata kuliah diberikan atas dasar gabungan nilai makalah, nilai partisipasi dalam semianar dan nilai ujian akhir semester.

c. Penilaian terhadap hasil ujian mata kuliah dan ujian-ujian lain dapat dilakukan dengan memberikan nilai angka, nilai huruf atau nilai bobot.
d. Konversi nilai angka, nilai huruf, dan niali bobot dibuat ketentuan sebagai berikut:

Nilai Angka	**Nilai Huruf**	**Nialai Bobot**	**Keterangan**
95-100	A+	4	Diberikan kepada peserta genius yang mengetahui baik materi perkuliahan ditambah dengan pemahaman mendalam dam interprestasi yang orisinal
90-94	A	3.75	
85-89	A-	3,50	Diberikan kepada peserta yang mengetahui amat baik materi perkuliahan ditambah dengan pemahaman dan interprestasi yang baik
80-84	B+	3,25	
75-79	B	3,00	Diberikan kepada peserta yang mengetahui materi perkuliahan dengan baik dan ditambah dengan pemahaman dan interprestasi yang memadai
70-74	B-	2,75	
65-69	C+	2,50	Gagal
60-64	C	2,25	Gagal
55-59	C-	2,00	Gagal
50-54	D	1,00	Gagal
00-49	E	0,00	Gagal

4. Indeks Prestasi

a. Penentuan Indeks Prestasi Semester (IPS) dilakukan setelah nilai semua mata kuliah semester diterima dari para pemegang mata kuliah.

b. IPS adalah hasil penghitungan jumlah nilai seluruh mata kuliah (jumlah sks kali nilai bobot) pada suatu semester, dibagi dnegan jumlah sks-nya.

c. Penentuan Indeks prestasi Kumulatif (IPK) dilakuakn setelah peserta dapat menyelesaikan seluruh mata kuliah dan ujian-ujian sesuai ketentuan. IPK adalah hasil penghitungan jumlah nilai (jumlah sks kali nilai bobot) semua mata kuliah dibagi dengan sks

MK	SKS	Nilai	Nilai Bobot
MK 1	4 sks	A+	4x4 =16
MK 2	4 sks	A	4x3 = 12
MK 3	4 sks	B+	4x3,25 =13
MK 4	4 sks	B	4x3 = 12
Jumlah	16 sks		= 53

IPS= 53:16=3.31

Contoh IPK

MK	SKS	Nilai	Nilai Bobot
MK 1	4 sks	A+	4x4,00 = 16
MK 2	4 sks	A-	4x3,50 = 14
MK 3	4 sks	B+	4x3,25 = 13
MK 4	4 sks	B	4x3,00 = 12
MK 5	4 sks	B	4x3,00 = 12
S. Prop. T	4 sks	A	4x3,75 = 15
K. Komp.	4 sks	A-	4x3,50 = 21
U. Prop. T	4 sks	A	4x3,75 = 15
W. Progress T	4 sks	B	4x3,00 = 12
U. Pendahulaun T	4 sks	B-	4x3,00 = 12
U Tesis	4 sks	A+	6x3,75 = 22,5
Jumlah	46 sks		= 164 sks

IPK = 164,5:46=3,58

Predikat/Yudisium = Sangat Memuaskan

5. Prediakt Kelulusan

Peserta dapat dinyatakan lulus bila memperoleh IPK palin kurang 2,75. Predikat Kelulusan peserta adalah sebagai berikut:

Cumlaude	IPK	3,65-4,00
Sangat Memuaskan	IPK	3,15-3,64
Memuaskan	IPK	2,75-3,14

6. Predikat Kelulusan Terpuji

Ujian Promosi Magister atau Doktor dapat menetapkan niai *Camlaude* di luar ketentuan di atas apabila rata-rata nilai semester $\geq$ 87 smentara nilai ujian Promosi (Tesis atau Disertasi) rata-rata $\geq$ 95. Nilai mata kuliah komponen riset dinaikkan menjadi lebih tinggi dari aslinya sehingga IPK-nya minimal 3,65.[31]

F. Tugas dan Kewajiban Dosen

1. Guru Besar dan Dosen

a. Setiap matakuiah diasuh oleh tim dosen karena sifatnya interdisipliner. Oleh karena itu setiap mata kuliah ada Guru Besar yang ditunjuk sebagai Penanggung Jawab atau Koordinator.
b. Mahasiswa dapat berkoordinasi denagn para Guru Besar untuk kepentingan akademik dan/atau non akademik.
c. Dosen yang menjadi pengasuh mata kuliah semuanya berpendidikan Doktor (Ph.D) dan/atau berpangkat Guru Besar (Profesor) dengan kualifikasi tertentu.

2. Tugas Guru Besar Penanggung Jawab / Koordinator Mata Kuliah

a. Menjabarkan Mata kuliah yang diasuhnya dalam bentuk sub-sub bahasan dengan mempertimbangkan konteks

---

[31] Pedoman Akademik Program Magister dan Doktor Pengkajian Islam 2011 – 2015 (Jakarta: UIN Syahida, 2011), 27-30.

keindonesiaan, kebutuhan mahasiswa sesuai permintaan akademik dan perkembangan ilmu pengetahuan yang *up to date* dan berwawasan global.

b. Mendistribusikan sub-sub bahasan mata kuliah sesai dengan minat dan keahlian anggota tim dosen dan menjadualkannya sesuai waktu perkuliahan yang tersedia (16 kali pertemuan).
c. Menentukan standard an metode penilaian.
d. Menyampaikan perkuliahan sekurang-kurangnya du kali dalam satu semester untuk setiap mata kuliah dan/atau sebanyak-banyaknya berdasarkan kesepakatan dengan tim dosen. Pertemuan pertama dilakukan pada awal perkuliahan untuk menjelaskan orientasi mata kuliah, sub-sub bahasan, tim dosen yang akan mengajar, standard an metode penelitian.
e. Melakukan *assessment* terhadap pelaksanaan perkuliahan.

3. Tugas Dosen Penasehat Akademik/Koordinator Mahasiswa Beasiswa

a. Membantu mahasiswa mengenali dan mengidentifikasi minat dan bakat serta kemampuan akademik mahasiswa bimbingannya.
b. Membantu mahasiswa dalam mempersiapkan dan menyusun rencana studi (menetapkan jenis mata kuliah)

sesuai minat, bakat dan kemampuan akademik mahasiswa bimbingannya.

c. Membantu mahasiswa memahami kebijakan Sps dan UIN Jakarta.
d. Menjadi pembimbing penulisan Proposal tesis/disertasi sejak awal perkuliahan.
e. Memantau perkembangan studi mahasiswa bimbingannya.
f. Membantu menemukan jalan keluar untuk mengatsi permasalahn yang menghambat studi.
g. Mengajak serta melakukan kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian, penertiban dan/atau pengabdian masyarakat.

CATATAN:
Kedudukan dosen penasehat Akademik berakhir samapi mahasiswa bimbingannya telah memperoleh Pembimbing penulisan Tesis/Disertasi.

4. Kewajiban Dosen Penasehat Akademik / Koordinator Mahasiswa Beasiswa

a. Dosen Penasehat/Koordinator Mahasiswa Beasiswa wajib hadir di kampus 2 samapai 4 kalai setiap tahun.
b. Dosen Penasehat/Koordinator Mahasiswa Beasiswa sekaligus bertugas sebagai pembimbing Proposal tesis/Disertasi.

c. Mahasiswa wajib mengajukan kontrak rencana penyelesaian studi.
d. Dosen perkewajiban mencantumkan jadual konsultasi dalam ruang dosen.
e. Mahasiwa wajib melakukan rutin. Apabila mahasiswa 3 kali sesuai yang dijadualkan tidak melakukan konsultasi akan diberi peringatan.
f. Dosen wajib mengingatkan para mahasiwa agar menghindarkan diri dari plagiarism dalam penulisan karya ilmiah dan kegiatan akademik lainya.

5. Kewajiban Pembimbing Tesis dan Disertasi dan Mahasiswa Bimbingannya

a. Memberikan arahan kepada mahasiswa agar dalam penulisan Tesis dan Disertasi mematuhi rambu-rambu penulisan karya ilmiah yang berlaku. Menggunakan referensi yang banyak, otoritatif, berwawasan global/international dan *up to date.*
b. Mengusahakan agar penulisan tesis dapat diselesaikan maksimal 1 tahun dan penulisan disertasi maksimal 2 tahun.
c. Mahasiswa wajib konsultasi rutin. Jika dalam 3 kali sesuai yang dijadualkan tidak melakukan konsultasi akan diberi peringatan.

d. Mahasisawa wajib melaporkan perkembangan penulisan tesis sekurang-kurangnya 2 bulan sekali dalam bentuk *work in progress.*
e. Mahasiswa wajib melakukan kontrak rencana penyelesaian Tesis dan Disertasi.
f. Dosen dan Mahasiswa berkewajiban menandatangani Buku atau Lembar Konsultasi setiap kali kegiatan bimbingan.

6. Tugas Dosen Koordinator Mahasiswa Beasiswa

Para dosen ada yang diberi tugas untuk menjadi koordinator kelompok mahasiswa tertentu yang mendapat beasiswa dari suatu instansi yang bekerjasama dengan Sekolah Pasacasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada dasarnya tugas dosen ini sama dengan dosen Penasehat Akademik, hanya sedidkit tambahan. Secara rinci tugas dosen coordinator ini adalah:

a. Membantu para mahasiswa untuk menyelesaikan studinya sesuai dengan waktu yang ditetapkan melalui kegiatan work shop percepatan studi, bimbingan akademik khusus dan lain-lain. Hal ini dimaksudkan agar studinya selesai sebelum masa berakhirnya beasiswa.
b. Bersama para mahasiswa melaksanakan berbagai kegiatan tingkat nasional dan international

bekerjasama dengan lembaga pemberi beasiswa dan lembaga lain sewasta maupun pemerintah.[32]

G. Layanan Administrasi

1. Pendaftaran Ulang dan Pengisian KRS

a. Setiap mahasiswa diwajibkan melakukan pendaftaran ulang setiap semester (gasal dan genap) secara on line dan membayar keunagan sesuai ketentuan.
b. Mahasiswa yang telah melakukan pendaftaran ulang diperkenankan mengisi KRS online.
c. Yang dicantumkan dalam KRS adalah mata kuliah dan ujian-ujian yang direncanakan.
d. Pengisian KRS dibatasi jumlah sks nya sesuai ketentuan.
e. Waktu pendaftaran ulang dibuat jadual khusus.
f. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftran ulang setiap semester dapat dinyatakan mengundurkan diri dari perkkuliahan setelah diberi peringatan secara tertulis tiga kali dalam semester yang sedang berlangsung.
g. Keterlambatan pendaftaran ulang dapat dikenakan sanksi pembayaran yang besarnya sesuai ketentuan.

---

[32] Pedoman Akademik Program Magister dan Doktor Pengkajian Islam 2011 – 2015 (Jakarta: UIN Syahida, 2011), 55-57.

2. Perbaikan KRS

a. Perbaikan KRS dapat dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah perkuliahan efektif.
b. Perbaikan KRS dapat dimungkinkan karena beberapa alasan mislanya adanua perubahan jadual, dan adanya pengurangan atau penambahan mata kuliah yang ditawarkan.
c. Sesuai mta kuliah dapat diselenggarakan apabila jumlah pendaftar/pengisian KRS sekurang-kuranngnya 12 mahasiswa dan paling banyak 17 mahasiswa, kecuali dan ketentuan khusus yang diberlakukan.

3. Cuti Kuliah

a. Cuti kuliah merupakan hak mahasiwa.
b. Cuti kuliah hanya dapat dilakukan karena alasan medis, rangkap studi/penelitian dan ibadah haji.
c. Selama cuti kuliah wajib membayat biaya perkuliahan secara penuh.
d. Cuti kuliah berfungsi sebagai penambahan batas akhir penyelesaian studi.
e. Selama cuti kuliah, mahsiswa bisa mendapatkan pelayanan akademik dan administrasi.
f. Cuti kuliah paling lama dua semester.

g. Cuti kuliah hanya boleh dilakukan sekurang-kurangnya sudah mengikuti perkuliahan 3 (tiga) semester bagi S2 dan 4 (empat) Semester bagi S3.
h. Cuti kuliah diajukan sebelum perkuliah di mulai.
i. Mahasiwa yang sudah selesai cuti kuliah diharuskan melakukan pendaftaran ulang.

4. Pelepasan Magister/Doktor dan Wisuda

a. Mahasiswa yang sudah menyelesaikan seluruh program perkuliahan dan memenuhi persyaratan, diwisuda oleh Rektor dalam ucapan wisuda.
b. Selain mengikuti wisuda, wisudawan magister dan doctor Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta juga diwajibkan mengikuti upacara pelepasan yang diselenggarakan oleh Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hiadayatullah Jakarta.
c. Selain persyaratan yang ditetapkan oleh Sekolah Pascasarjana, calon wisudawan diwajibkan pula memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh panitia/rector.

5. Wisudawan Terbaik

a. Dalam upacara Wisuda Sarjan biasanya dinobatkan wisudawan terbaik.
b. Wisudawan terbaik yang diusulkan oleh Sekolah Pascasarjana ditetapkan oleh Tim.

c. Persyaratan penetapan menjadi Wisudawan terbaik:
   i. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tertinggi.
   ii. Kualitas Tesis dan Disertasi
   iii. Masa penyelesaian studi tercepat dan/atau tidak melebihi masa studi yang ditentukan (4 tahun untuk S2 dan 5 tahun untuk S3).
   iv. Tidak mahasiswa ahli status.
   v. Pertimbangan Khusus dari Tim, terutama menyangkut Integritas dan moralitas.

6. Pengambilan Ijazah dan Transkrip Akademik

a. Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh program dan memenuhi semua persyaratan administrasi, termasuk telah diwisuda berhak memperoleh ijazah dan transkrip akademik.
b. Persyaratan pengambilan ijazah dan transkrip akademik antara lain: 1) Telah memperbaikai Tesid atau Disertasi dan telah diterbitkan menjadi buku lengkap dengan ISBN, 2) Telah menyerahkan Tesis atau Disertasi ke pembimbing dan penguji serta Perpustakaan Sekolah Pascasarjana dan kepada pihak lain yang ditetapkan, 3) Telah mengunggah (upload) buku yang diterbitkan di website (*situs*) Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 4) tidak memiliki berbagai pinjaman terkait dengan Sekolah Pascasarjana dan/atau UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

c. Pengambilan Ijazah dan transkrip Akademik dilakukan oleh yang bersangkutan paling lama 1 (satu) tahun setelah Wisuda.

d. Keterlambatan pengurusan dan/atau pengambilan ijazah dikenakan sanksi sesuai ketentuan.[33]

H. Mahasiswa dan Alumni

1. Hak Mahasiswa

a. Selama masa studi, setiap mahasiswa berhak mendapatkan bimbingan akademik yang telah ditetapkan.

b. Setiap mahasiswa berhak mengikuti perkuliahan yang telah ditentukan atau dipilih.

c. Setiap mahasiswa berhak mngikuti dan menghadiri berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Sekolah Pascasarjana seperti Kuliah umum, seminar-seminar, penelitian-penelitian, pengabdian masyarakat, ujian proposal, *work in progress,* ujian pendahuluan, dan ujian promosi doktor.

d. Setiap mahasiswa berhak mengambil cuti kuliah karena beberapa alasan yang dimungkinkan, namun tetap membayar uang mata kuliah secara penuh.

e. Mahasiswa berhak memperoleh nilai atau predikat kelulusan yang didasarkan pada obyektifitas ilmiah

---

[33] Pedoman Akademik Program Magister dan Doktor Pengkajian Islam 2011 – 2015 (Jakarta: UIN Syahida, 2011), 59-61.

pertimbangan perbedaan jenis kelamin, ras, paham keagamaan, mazhab, partai, ideology, dll.

2. Kewajiban Mahasiswa

a. Para mahasiswa diwajibkan menjaga nama baik almamater, agama dan bangsa dan mematuhi tata tertib dan ketentuan yang telah ditetapkan seperi melakukan daftar ulang setiap semester, hadir kuliah sebelum waktunya, mengikuti perkuliahan minimal 75% dari total kehadiran dosen setiap semester, berpakaian rapi lagi sopan, mengikuti kegiatan pendidikan yang dilaksanakan dalam bentuk perkuliahan formal, seminar, tutorial, penugasan dan kegiatan lain dengan bimbingan dan lainnya.
b. Mahasiswa wajib mengikuti orientasi studi pada semester pertama.
c. Mahasiswa wajib mengisi Skedul penyelesaian Studi pada semester pertama dan dapat diperbaiki setiap semester yang diketahui dosen penasehat Akademik,
d. Kegiatan di luar perkuliahan harus diisi dengan belajar sediri, menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan, kunjungan ke perpustakaan, kegiatan lain yang menunjag perkuliahan.
e. Mahasiswa tidak dibenarkan menyontek atau tindakan serupa yang negative dalam bidang akademik.

f. Adlam melakukan riset atau tugas akademik baik paper/makalah, proposal, tesis maupun disertasi, mahasiswa tidak dibenarkan plagiasi. Tindakan plagiarism adalah tindakan criminal dalam bidang akademik yang tidak dapat dimaafkan. Pelakunya dapat dinyatakan gagal dan dikeluarkan dari program atau kehilangan haknya untuk menyandang gelar akademik. Tindakan Plagiarisme adalah mengkopi/menyalin sebagain atau seluruh karya orang lain yang klaim sebagai karya sendiri tanpa menyebutkan sumbernya. Tesis dan Disertasi haruslah merupakan karya asli ditandatangani oleh penulis di materai yang cukup.

g. Selama kuliah, mahasiswa diwajibkan menulis artikel yang diterbitkan dalam media cetak dan oline Sekolah Pascasarjana dan/atau media cetak dan online lain, dan menjadi salah satu syarat untuk mendaftar ujian Tesis dan Disertasi. Diutamakan media cetak dan online yang bersidat Internasional.

3. Alumni

a. Lulusan Program Magister dan Doktor Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hiadayatullah Jakarta secara otomatis tergabing dalam ikatan alumni Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hiadayatullah Jakarta sehingga berhak untuk dipilih menjadi pengurus.

b. Setiap alumni berkewajiban memelihara nama baik almamater.
c. Setiap alumni diwajibkan turut berpartisipasi dalam mendukung pengembangan program studi Sekolah Pascasarjana UIN Syari Hidayatullah Jakarta dalam bentuk:
   1) Sumbangan dana;
   2) Sumbangan fasilitas
   3) Saran untuk perbaikan proses pembelajaran;
   4) Pengembangan jejaring;[34]

I. Fasilitas

Sebagai bagian dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, pada dasarnya setiap mahasiswa Sps UIN Jakarta bisa mengakses semua fasilitas yang ada di UIN, seperti perpustakaan Pusat, Perpustakaan Fakultas, pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Syarif Hidayatullah, Student Center, dll. Namun dalam konteks penguatan akademik yang mengarah kepada *International Research University,* Sekolah Pascasarjana mengembangkan beberapa fasilitas pendukung.

Indikator penting untuk mewujudkan *International Research University* adalah kemampuan menghubungkan isu-isu personal/local/primordial dengan perdebatan akademik dan referensi global/internasional yang otoritatif. Untuk itu, SPs

---

[34] Pedoman Akademik Program Magister dan Doktor Pengkajian Islam 2011 – 2015 (Jakarta: UIN Syahida, 2011), 63-64.

mengembangkan suasana fisik yang nyaman, iklim akademik yang kondusif, dan kemudahan untuk mengakses *international academic resource,* baik di dalam maupun di luar ruangan.

Sementara *hot spot* bisa digunakan semua pengunjung SPs, Resource Center dengan segala Fasilitas yang ada, hanya bisa diakses oleh mahasiswa SPs. Mahasiswa yang sedang menulis Tesis dan Disertasi mendapatkan fasilitas ruang kerja di *Quite Room.* Selain dapat digunakan untuk diskusi informal dan bersosialisasi, *Common Room* juga difasilitasi dengan internet, Koran dan majalah. Untuk menghasilkan kualitas riset yang ekselen disediakan Ruang Konsultasi dan Bimbingan Mahasiswa.

Selain itu Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menerbitkan *Newsletter The School, Jurnal Indo Islamika, Jurnal Studia Religia,* prospectus, brosur, dan penerbitan *on line* lainnya di website Sekolah Pascasarjan www.graduate-uinjkt.net dan website UIN Syarif Hidayatullah Jakarta www.uinjkt.ac.id.[35]

---

[35] Pedoman Akademik Program Magister dan Doktor Pengkajian Islam 2011 – 2015 (Jakarta: UIN Syahida, 2011), 65.

BAB IV
PROFIL PPs IAIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

A. Latar Belakang

Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam, telah berjasa memproduksi sarjana, dan intelektual Muslim yang memiliki kompetensi dalam penguasaan ilmu-ilmu agama islam, yakni sejak lembaga pendidikan ini didirikan pada tahun 1962. Program Pascasarjana didirikan untuk melanjutkan inspirasi yang terkandung dalam misi IAIN SMH Banten itu sendiri, yang selalu committed dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang mampu menjawab persoalan umat dan bangsa sesuai upaya pemecahan persoalan yang menyangkut misi pengembangan dan penguatan pendidikan, pencerahan umat lewat dakwah, dan disiplin keilmuan Islam.

Dari awal pewujudannya. Pendirian program pascasarjana merupakan gagasan, idealisme dan obsesi seluruh civitas academica IAIN Banten, yang telah dituangkan dalam Rncana Induk Pengembangan (RIP) dan *Master Plan* IAIN Banten tahun 2006. Gagasan stategis ini mendapat dukungan kolektif

baik dari dalam kampus maupun dari luar kampus. Dalam rangkaian waktu yang tidak pendek, berbagai upaya serius ditindaklanjuti untuk memperoleh ketentuan ketentuan kualifikatif yang berlaku bagi pendirian progrem pascasarjana.

Untuk memperoleh kelengkapan data akademis, administrative dan teknis, panitia persiapan melakukan kajian komprehensif dalam mencermati dan menganalisis seluruh potensi yang dimiliki IAIN SMH Banten, serta mendalami kekuatan dan kelemahan, peluang dan tantangannya, serta kondidi-kondisi strategis wilayah Provinsi Banten dan Provinsi-provinsi potensial di sekitarnya yang berbatasan langsung dengan Banten. Setelah kajian ini dilakukan, panitia berupaya memformulasikan hasil kajian tersebut dengan sistematis dalam Proposal Pendirian Program Pascasarjana IAIN SMH Banten. Tahap berikutnya setelah proposal disahkan oleh sidang senat, panitia mengusulkan proposal tersebut kepada Menteri Agama Republik Indonesia. Dengan proses dan semangat berjuang yang tidak pernah berhenti, akhirnya upaya itu berbuah sukses dengan dikeluarkannya Keputusan Dirjen pendidikan Islam, Nomor: Dj.1/807/2010 tanggal 22 November 2010 tentang izin penyelenggaraan program studi strata dua yaitu program studi Pendidikan Agama Islam (PAI) dan studi Hukum Keluarga (HK) (*Akwal*

al-Syakhshiyyah) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Berdasarkan keputusan Dirjen tersebut, pada Tahun Akademik 2011/2012 IAIN SMH Banten resmi mulai membuka dan menerima mahasiswa baru program Pascasarjana, dengan dua program studi: Program Studi Pendidikan Agama Islam dan Program Studi Hukum Keluarga (*Akwal al-Syakhshiyyah*).

Akhirnya, stelah mendapat Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan No. 1466 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Program Studi S2, PPs IAIN SMH Banten membuka program studi baru, yaitu Ekonomi Syariah.

B. Visi, Misi dan Tujuan IAIN SMH Banten

1. Visi

Visi Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten adalah terwujudnya lembaga pendidikan tinggi agama Islam terkemuka di Indonesia yang mampu mengembangkan dan mengintegrasikan aspek keislaman, keilmuan, kemanusiaan dan keindonesiaan. Sementara itu, sebagai bagian dari IAIN SMH Banten, ProgramPascasarjana (PPs) IAIN SMH Banten mempunyai visi “menjadi pusat pengembangan

kajian keislaman serta intelektual dan ilmuwan Muslim terkemuka yang berwawasan luas, professional dan menjunjung tinggi *akhlaq al-karimah*.

2. Misi

Secara umum misi Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten adalah: (1) menyeleng-garakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang islami dan berkualitas. (2) Mewujudkan insan akademis yang cerdas dan berakhlak mulia. (3) Menumbuh-kembangkan etos ilmu, etos kerja dan etos pengabdian yang tinggi, serta berpartisipasi aktif dalam memberdayakan segenap potemsi masyarakat.

Sementara itu, secara khusus misi Program Pascasarjana IAIN SMHadalah: (1)Menyelenggarakan program studi keilmuan islam yang applicable dan relevan dengan perubahan zaman serta memiliki kapasitas tinngi dalam upaya memecahkan kebutuhan masyarakat baik lokal, regional, nasional dan global. (2) memproduk intelektual muslim yang memiliki kepekaan tinggi dalam upaya menjawab (merespons) tantangan baru dalam kehidupan sosial, pemikiran keagamaan, kebudayaan dan ekonomi

yang tumbuh ditengah masyarakat baik lokal, regional, nasional maupun global.

3. Tujuan

Tujuan IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten adalah: (1) menyiapkan mahasiswa agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau professional yang dapat menerapkan, keislaman dan seni yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman. (2) menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman dan seni yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkntaraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Sementara itu, secara umum, PPs IAIN SMH Banten bertujuan menghasilkan sarjana yang memiliki kematangan akidah, ilmu yang luas, profesionalisme dan semangat pengabdian yang tinggi pada nusa, bangsa dan agama. Secara khusus, PPs IAIN SMH Banten bertujuan untuk menghasilkan sarjana yang menguasai salah satu bidang ilmu keislaman dan memiliki sikap analitis, kritis, terbuka dan tanggap terhadap perkembangan IPTEK dan persoalan umat.

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan tersebut diperlukan kerja keras para pimpinan dan seluruh civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin

Banten secara bertahap dan berkesinambungan. Mereka harus berupaya membenahi kekurangan yang ada, melengkapi berbagai sarana dan prasarana serta aturan yang dibutuhkan dalam upaya mendukung mekanisme dan iklim kerja yang kondusif dan dinamis. Dengan demikian proses belajar mengajar sebagai bagian yang sangat strategis dilembaga pendidikan, akanberjalan lancar dan menghasilkan *output/outcome* sebagaimana Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

C. Program Studi: Visi, Misi, Tujuan dan Kompetensi

Sebagaimana disebutkan dimuka, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Banten menyelenggarakan tiga program studi pada jenjang megister, yaitu: program studi Pendidikan Agama Islam (PAI), program studi Hukum Keluarga (HK), dan Program Studi Ekonomi Syariah.

1. Program Studi Pendidikan Agama Islam

Dinamika perkembangan pemikiran kependidikan dalam Islam merupakan suatu yang mewarnai wacana dunia pendidikan di dunia Islam pada umumnya dan Indonesia khususnya. Hal ini terjadi karena perubahan pandangan, konsep, image, dan reformulasi orientasi pendidikan yang mengakibatkan timbulnya tuntutan modern. Karenanya, pendidikan Islam sebagai suatu disiplin ilmu semakin relevan

dan mendesak. Keberadaan Program Studi pendidikan Islam pada Program Pascasarjana IAIN SMH Banten ini adalah untuk menyiapkan tenaga yang berkualitas di bidang pendidikan.

a. Visi Program Studi PAI

Menjadi Program Studi Pendidikan Agama Islma yang unggul, terkemuka dan professional untuk menciptakan cendikiawan Muslim yang memiliki potensi sebagai praktisi, pemikir, peneliti, penggali dan pengembang khazanah pendidikan agama islam.

b. Misi Program Studi PAI

Sebagai konsekuensi logis dari Visi tersebut, Misi program studi PAI adalah menyelenggarakan pendidikan pascasarjana (jenjang strata dua) untuk: (1) menghasilkan praktisi, pemikir, peneliti, penggali dan pengembang Pendidikan Agama Islam yang unggul, terkemuka dan profesional. (2) Membangun masyarakat melalui penerapan hasil-hasil penelitian, pengkajian dan pengembangan dalam bidang Pendidikan Agama Islam. (3) Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas dan kinerja Program Studi Pendidikan Agama Islam. (4) Memberdayakan alumni dalam rangka peningkatan peran dan citra Program Studi Pendidikan Agama Islam.

c. Tujuan Program Studi PAI

Program Studi Pendidikan Agama Islam tingkat megister (S2) Program Pascasarjana IAIN SMH Banten bertujuan untuk menyiapkan: (1) Tenaga ahli, praktisi, peneliti, penggali dan pengembang Pendidikan Agama Islam yang mengabdikan diri di lingkungan sekolah/madrasah, lembaga-lembaga pendidikan Islam dan pesantren, dan di badan-badan atau lembaga-lembaga pendidikan Islam yang relevan. (2) Tenaga ahli, praktisi, pemikir, peneliti,penggali dan pengembang Pendidikan Agama Islam dengan landasann dan wawasan keilmuan yang kuat sehingga mampu meningkatkan aspek kualitas teoritik dan mutu praktik aplikatif bidang tersebut dalam lingkungan kerja dan masyarakat luas. (3) Tenaga konsultan/pakar bagi para guru dan sekolah/madrasah lain, orangtua, dan masyarakat umum yang terlibat di dalam usaha-usaha bantuan bagi pemecahan masalah-masalah pembelajaran dan pengajaran serta pendidikan agama Islam.

d. Kompetisi Lulusan Program Studi PAI

Lulusan Program Studi Pendidikan Agama Islam jenjang strata dua (S2) diharapkan: (1) Memahami konsep-konsep, prinsip dan teori-teori dalam pendidikan agama Islam berdasarkan Qurán, Hadists dan khazanah pendidikan agama Islam. (2) Mampu menerapkan prinsip, konsep dan teori-teori dalam pendidikan, psikologi, dan agama Islam sebagai acuan bertindak di dalammerencanakan, melaksanakan dan

mengevaluasi program pendidikan agama Islam, baik tingkat satuan pendidikan MI/SD, MTs/SMP, MA/SMA, maupun PT. (3) Mampu menggunakan konsep, teoi dan prinsip keislaman, kependidikan, kebahasaan dan tegnologi informasi dan komunikasi sebagai penguatan perspektif dan kompetensi di dalam menjelaskan fenomena-fenomena kependidikan Islam. (4) Mampu melakukan pengkajian, penelitian dan pengembangan ilmu pendidikan agama Islam serta dapat memanfaatkan hasil-hasil kajian, penelitian, dan pengembangan tersebut untuk menjawab masalah-masalah yang timbul dalam masyarakt, khususnya menyangkut pendidikan agama Islam.

2. Program Studi Hukum Keluarga

Studi Islam, saat ini, menghadapi tantangan yang semakin besar dan kompleks. Pesatnya kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan hanya memaksa parailmuan untuk berperan lebih aktif memikirkan masa depan peradaban umat manusia, akan tetapi para pemikir muslim dipanggil untuk lebih memahamidampak kemajuan peradaban manusia melalui pendekatan hukum Islam. Karena kompleksitas problematika kehidupan masyarakat yang memerlukan solusi hukum Islam secara efektif sejalan dengan perkembangan dan kemajuan dunia modern yang semakin kompleks (*musykil*) maka elastisitas hukum Islam semakin dituntut konkretitasnya

dalam masyarakat baik local, regional, nasional maupun internasional.

a. Visi Program Studi Hukum Keluarga

Menjadikan Program studi Hukum Keluarga sebagai pusat kajian terdepan dan *capable* dan menyelenggarakan pendidikan, penelitian yang mampu mencetak ilmuwan di bidang Hukum Keluarga yang berkapasitas intelektual, professional, berwawasan global dan berintegrasi akhlakul karimah.

b. Misi Program Studi Megister Hukum Keluarga

1) Mempersiapkan terbentuknya sarjana ahli berwawasan komperhensif, actual, dan kontekstual dalam bidang Hukum Keluarga.
2) Menyediakan informasidan pelayanan akademis untuk pengembangan keilmuan bidang Hukum Keluarga yang lebih aplikatif, integratif, dan komprehensif.
3) Mendidik generasi agar hidup bermanfaat ditengah tengah mayarakat dalam ikut membantu memecahkan persoalan kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan bidang keilmuan Hukum Keluarga.
4) Mencetak pemikir ilmu Hukum Keluarga yang mampumerespon perubahan masyarakat di tingkat lokal, nasional dan global.

c. Tujuan Program Studi Hukum keluarga

1) Memperdalam ilmu pengetahuanHukum Keluarga secara professional dengan berupaya menemukan gagasan-gagasan baru melalui kegiatan penelitian dan kegiatan akademik.
2) Menjadi pelopor pelaksana penelitian bidang Hukum Keluarga dalam upaya membangun tradisi ilmiah yang mandiri dan berguna bagi peradaban masyarakat.
3) Mencetak Megister Hukum Keluarga yang berintegritas tinggi, berwawasan ilmiah dan memiliki kedalaman spiritual.
4) Melahirkan Megister Hukum Keluarga yang mampu mengamalkan, memanfaatkan dan membagikan ilmunya di tengah-tengah kehidupan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup umat dan kualitas SDM bangsa.
5) Membekali peserta didik untuk memperluas wawasan pengetahuan berdasarkan kedalaman akidah, spiritual, dan akhlakul karimah.

d. Kompetensi Lulusan

1) Menguasai dan memahami bidang ilmu Hukum Keluarga serta penguasaan terhadap kaidah/teori filosofi, pendekatan dan metode.

2) Menjadi megister Hukum Keluarga yang mempunyai kompetensi dalam mengajar sesuai bidangnya, bekerja dan memimpin secara profesional di lembagayang sejalan dengan disiplin keahliannya baik di dalam maupun di luar negeri.
3) Mampu melakukan penelitian ilmiah dalam bidang keilmuan Hukum Keluarga melalui pendekatan gagasan, dan visi baru serta teori dan tesisbaru yang relevan dengan perkembangan dan perubahan masyarakat.

3. Program Studi Ekonomi Syariah

Perkembangan ekonomi yang berlandaskan syariat Islam sendiri di Indonesia mendapatkan momentum yang sangat berarti semenjak didirikannya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Pada saat itu, keberadaan system perbankan berdasarkan syariah memperoleh dasar hukum secara formal dengan diakuinya system perbankan berdasarkan syariah dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dalam UU No. 10 Tahun 1998 dan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Akan tetapi sesungguhnya geliat aksi maupun pemikiran ekonomi yang berlandaskan Islam di Indonesia memiliki sejarah yang panjang.

Sejarah kebangkitan bangsa ini sudah dimulai jauh sebelum kemerdekaan, ditandai dengan kemunculan syarikat dagang-syarikat dagang yang sibidani oleh para entrepreneur

dan intelektual muslim. Dapatlah dikatakan bahwa perkembangan ekonomi Islam sangat marak dewasa ini merupan cerminan dari kerinduan umat Islam Indonesia untuk berdagang, berinvestasi, dan berkreativitas bisnis secara Islami, sebagaimana diteladankan oleh Rasulullah SAW.

Dalam usia yang masih muda, ada dua tantangan besar yang dihadapi ekonomi Islam dalam konteksperkembangan dunia dewasa ini, yaitu: (1) ujian ataskredibilitas system ekonomi dan keuangannya dan (2) perangkat peraturan, hukum dan kebijakan baik dalam skala nasional maupun internasional. Berkenaan dengan perangkat hukum, peraturan dan kebijakan pemerintah, diperlukan advokasi bersama yang diperjuangkan secara bersama-sama. Keberhasilan menyelesaikan dua batu ujian ini merupakan persayaratan utama bagi pengembangan system ekonomi Islam.

Tantangan lain yang menjadi hambatan besar dalam perkembangan ekonomi Islam adalah pemahaman masyarakat yang masih terbatas mengenai esensi dan mekanisme kerja ekonomi Islam. Untuk itu, diseminasi (penyebaran) pemikiran ekonomi Islam sangat penting untuk member pemahaman yang tepat kepada masyarakt. Diseminasi tidak cukup dilakukan sendiri-sendiri, tetapi juga arus dilakukan dalam shaf-shaf bersama-sama. Untuk membangun kredibilitas dan mengembangkan kepercayaan masyarakat terhadap system ekonomi Islam.

Program Pascasarjana IAIN SMH Banten menjadi *agent of change*, *agent of modernization,* dan *instrument of social engineering* direncanakan akan membuka Program Studi Ekonomi Syariah yang diharapkan akan mampu menyiapkan sumber daya Islami dibidang ekonomi Islam/syariah dengan merekrut lulusan program Strata satu/S1 diwilayah provinsi Banten dan sekitarnya. Upaya ini diharapkan 2-4 tahun kedepan dapat menghasilkan tenaga professional yang ahli dalam bidang ekonomi syariah baik sebgai akademisi maupun praktisi.

Program pascasarjana prodi ekonimi syariah diharapkan mampu menyiapkan suberdaya ekonomi Islam dengan karateristik pengembangan ekonomi Islam, mengembangkan dan meletakkan teori dan konsep praktis ekonomi Islam. Sehingga dari output program studi ini akan membuka peluang untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi yaituStrata tiga (S3) Doktor.

a. Visi Program Studi Rkonomi Syariah

Unggul dalam mempersiapkan sumberdaya insane yang berkualitas dan mampu menjadi penggerak dan pelalsana kegiatan perekonomian Syariah.

b. Misi Program Studi Ekonomi Syariah

a) Mengantarkan mahasiswa ekonomi islam memiliki pengetahuan/pemahaman terhadap teori/konsep dasar ekonomi islam.

b) Menghantarkan mahasiswa agar memiliki kemampuan dan keterampilan untuk menjadi praktisi pada lembaga ekonomi Islam.
c) Menghantarkan mahasiswa agar memiliki kemantapan akidah dan kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, keluasan ilmu dan kematangan professional.

c. Tujuan Program Studi Ekonomi Syariah

1) Mewujudkan penerapan cita-cita penerapan syariah yang dimulai dari bidang ekonomi islam.
2) Mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Islam untuk kesejahteraan masyarakat.
3) Mendukung penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam yang disesuaikan dengan potensi wilayah dan potensi ekonomi serta sumber daya insane (SDI).
4) Turut serta meletakkan landasan yang cukup kuat bagi pertumbuhan pembangunan nasional.
5) Meningkatkan peran serta masyarakat melalui pengembangan Sumber Daya Insani (SDI) untuk meningkatkan pengetahuan dalam rangka optimalisasi potensi daerah.

d. Kompetensi Program Studi Ekonomi Syariah

1) Menguasai ilmu ekonomi konvensional dan Islam secar seimbang.

2) Memiliki kemampuan mengaplikasikan keilmuan dalam bidang lembaga ekonomi Islam
3) Memiliki pengetahuan/pemahaman tentang teori/konsep dasar ilmu ekonomi konvensional dalam bidang mikro, makro, moneter dan pembangunan.
4) Mmemiliki kemampuan dan keterampilan untuk menjabat sebagai manajer pada lembaga ekonomi Islam.
5) Memiliki kemampuan dan keterampilan untuk menjadi tenaga operasional pada lembaga ekonomi Islam.
6) Memiliki kemampuan dan keterampilan dalam bidang akuntansi dan ekonomi secara mahir.
7) Memiliki kemampuan yang mapan dalam bidang Matematika, Statistik terapan, ekonomi makro dan ekonomi mikro.
8) Memililiki kemanpuan dan keterampilan dibidang teknologi.
9) Memiliki keterampilan dalam bidang bahasa Indonesi, Inggris dan Arab.
10) Memiliki sikap/prilaku akhlaqul karimah
11) Memiliki komitmen menjalankan syari'ah secara benar dan istiqomah.
12) Memiliki kemampun untuk menjalankan produk-produk lembaga ekonomi Islam dan dapat

membedakan dengan produk lembaga ekonomi konvensional.

13) Memiliki kemampuan dan keterampilan yang terkait dengan bidang Banking, Asuransi, Pasar Modal, Peggadaian dan Koperasi. ((Buku Pedoman Akademik Program Pascasarjana IAIN SMH Banten (2015:4-21).

D. Kegiatan Akademik

1. Tujuan Akademik

a. Menyiapkan tenaga pengajar dalam bidang ilmu keislaman untuk program pendidikan tingkat sarjana (S1) di Perguruan Tinggi sesuai dengan bidang yang menjadi konsentrasi.
b. Menyiapkan tenaga peneliti yang mampu mengembangkan ilmu-ilmu agama Islam, terutama yang menjadi konsentrasi mahasiswa.
c. Menyiapkan tenaga yang ahli dan professional dalam bidang-bidang tertentu (pendidikan agama Islam, hokum keluarga dan Ekonomi Syariah).

2. Beban Studi

Beban studi yang harus diselesaikan oleh mahasiswa pada jenjang S2 Program Pascasarjana IAIN SMH Banten berjumlah 43-48 SKS dan ditambah dengan tugas-tugas lain yang menjadi persyaratan kelulusan yang terdiri atas:

a. Mata Kuliah Kompetensi Dasar
b. Mata Kuliah Kompetensi Utama

c. Mata Kuliah Kompetensi Penunjang
d. Mata Kuliah Kompetensi Pilihan
e. Ujian Seminar Proposal Tesis
f. Ujian Konprehensif
g. Tesis Megister
h. TOEFL dan TOAFL dengan skor masing-masing 450. Bagi mahasiswa yang memiliki nilai di bawah standar diwajibkan mengikuti kursus dan mengikuti kursus dan mengikuti kursus dan mengikuti ujian ulang hingga hasilnya memenuhi standar yang ditentukan.

3. Kurikulum

Kurikulum Program Pascasarjana IAIN SMH Banten, baik program studi Pendidikan Agama Islam maupun program studi Hukum Keluarga, terdiri atas 4 kelompok mata kuliah, yaitu Mata Kuliah Kompetensi Dasar (MKD), Mata Kuliah Kompetensi Utama (MKU), Mata Kuliah Kompetensi Penunjang (MKPn), Mata Kuliah Kompetensi Pilihan (MKPi).

Berikut ini disajikan kelompok mata kuliah, nama mata kuliah, kode mata kuliah pada program studi PAI dan program studi Hukum Keluarga. Kode mata kuliah terdiri atas 6 digit, yakni, digit pertamaadalah kodeprogram pascasarjana, digit kedua program studi (1= Program Studi PAI dan 2= Program Studi Hukum Keluarga), digit ketiga semester, digit keempat dan kelima nama mata kuliah, dan digit terakhir adalah komponen mata kuliah.

a. Kurikulum Program Studi Pendidikan Agama Islam Tabel: Kurikulum, Kode Mata Kuliah dan Penyebaran Mata Kuliah Program Studi Pendidkan Agama Islam

Kode MK	Kelompok dan Nama Mata Kuliah	Bobot	S 1	S 2	S 3	S 4	Ket
A	MKD (Mata Kuliah Kompetensi Dasar)	15					
41101A	1. Ulum al-Qur'an	3	√				
41102A	2. Ulum al-Hadits	3	√				
41103A	3. Filsafat Ilmu (Umum dan Islam)	3	√				
41104A	4. Sejarah Perkembangan dan Peradaban Islam (klasik-modern)	3	√				
41105A	5. Metodologi Penelitian Pendidikan Agama Islam	3	√				
							15

Kode MK	Kelompok dan Nama Mata Kuliah	Bobot	S 1	S 2	S 3	S 4	Ket
B	**MKU (Mata Kuliah Kompetensi Utama)**	**19**					
41206B	1. Tafsir dan Hadits Tarbawi / Pendidikan Islam dalam Perspektif al-Qur'an dan al-Hadits	3		√			
41207B	2. Filsafat Pendidikan Islam	3		√			
41208B	3. Sejarah Pendidikan Islam	3		√			
41209B	4. Pendidikan Islam Nusantara	3		√			
41210B	5. Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan Islam	2		√			
41311B	6. Pengembangan Materi Ajar dan Kurikulum Pendidikan Agama Islam	3			√		
41312B	7. Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam	2			√		
							19
C	**MKPn (Mata Kuliah Kompetensi Penunjang)**	**4**					
41113C	1. Bahasa Arab: Studi Teks Pendidikan	0	√				
41214C	2. Bahasa Inggris : Studi Teks Pendidikan	0		√			

Kode MK	Kelompok dan Nama Mata Kuliah	Bobot	S 1	S 2	S 3	S 4	Ket
41315A	3. TIK dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam	2			√		
41316C	4. Seminar Proposal Tesis	2			√		
41317C	5. Ujian Proposal Tesis						Jad-wal khusus
41018C	6. Ujian Komprehensif						Jadwl khusus
							4
D	**MKPi (Mata Kuliah Kompetensi Pilihan)**	**4**					
41319D	**1. Paradigma Baru dalam Pembelajaran PAI**	2			√		
41320D	2. Isu-Isu Pendidikan Kontemporer	2					
41321D	3. Pengembangan dan Penyusunan Bahan Ajar (Buku) PAI	2					
41322D	4. Sejarah Pemikiran Islam Modern	2					
							4
41000T	**THESIS MAGISTER PAI**	**6**				√	**6**
	Jumlah Total	**48**	**15**	**14**	**13**	**6**	**48**

b. Kurikulum Program Studi Hukum Keluarga
Tabel 2: Kurikulum dan Penyebaran Mata Kuliah Program Studi Hukum Keluarga

Kode MK	Kelompok dan Nama Mata Kuliah	Bobot SKS	S 1	S 2	S 3	S 4	KET
A	MKD (Mata Kuliah Kompetensi Dasar)	15					
42101A	1. Ulum al-Qur'an	3	√				
42002A	2. Ulum al-Hadits	3	√				
42103A	3. Filsafat Ilmu	3	√				
42104A	4. Sejarah perkembangan dan Peradaban Islam	3	√				
42105A	5. Metodologi Penelitian (HK)	3	√				
							15
B	MKU (Mata Kuliah Kompetensi Utama)	21					
42206B	1. Fiqh Muqaran	3		√			
42207B	2. Sejarah Peradilan dalam Islam	3		√			
42308B	3. Ushul Fiqh Muqaran	3			√		
42209B	4. Hukum Keluarga Nusantara	3		√			
42310B	5. Qanun Ahwal al-Syakhsyiah	3			√		
42311B	6. Qawaid Fiqhiyah	3			√		
42212B	7. Perkembangan Modern Hukum Islam	3		√			
							21

Kode MK	Kelompok dan Nama Mata Kuliah	Bobot SKS	S 1	S 2	S 3	S 4	KET
C	**MKPn (Mata Kuliah Kompetensi Penunjang)**	**0**					
42113C	1. Bahasa Arab: Studi Teks Hukum Islam	0	√				
42214C	2. Bahasa Inggris : Studi Teks Hukum Islam	0		√			
42315C	3. Seminar Proposal Tesis	0			√		
42016C	4. Ujian Proposal Tesis						Jadwal khusus
42017C	5. Ujian Komprehensif						Jadwal khusus
							2
D	**MKPn (Mata Kuliah Kompetensi Pilihan)**	6					
42318D	**1. Fiqih Kontemporer**	3			√		
42319D	2. Sejarah Pemikiran Islam	3			√		
42320D	3. Sejarah Pemikiran Hukum Islam	3		√			
							6
42000T	**THESIS MAGISTER Hukum Keluarga**	6				√	6
	Jumlah Total	48	15	15	12	6	48

c. Kurikulum Program Studi Ekonomi Syariah
Tabel 3: Kurikulum dan Penyebaran Mata Kuliah Program Studi Ekonomi Syariah

No	Mata Kuliah	SKS
I	**Kompetensi Dasar**	
1	Ulumul Qur'an / Ayat Iqtishady	3
2	Ulumul Hadits / Hadits Iqtishady	3
3	Ushul Fiqh dan Maqashid Syariah	3
4	Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam	3
5	Metodologi Penelitian Ekonomi Syariah	3
II	**Kompetensi Utama**	
6	Fiqh Muamalah Kontemporer	3
7	Teori Ekonomi Islam/Islamic Micro-Macroeconomics	3
8	Manajemen Keuangan & Investasi Syariah	3
9	Manajemen Zakat dan Wakaf Produktif	3
10	Lembaga Keuangan Syariah	3
11	Statistika Ekonomi / Econometric	3
III	**Kompetensi Penunjang**	**3**
IV	**Kompetensi Pilihan**	**6**
V	**Thesis**	**6**
Jumlah		48

4. Sistem Perkuliahan

Metode perkuliahan yang diterapkan pada program Pascasarjana IAIN SMH Banten adalah metode seminar. Setiap materi yang diberikan kepada para mahasiswa perlu dipelajari melalui kegiatan berfikir mandiri, rasional, dan kritis serta banyak membaca, menulis dan meneliti. Dalam metode seminar ini, seluruh peserta diwajibkan sebanyak mungkin membaca buku sesuai topik makalah, memahami isibuku secara mandiri dan kritis, menyimpulkan sendiri, serta memilih data yang diperlukan untuk penulisan makalah. Makalah tersebut ditulis sendiri oleh peserta untuk dimajukan dan diseminarkan di dalam kelas dengan bimbingan dosen pengampu mata kuliah.

5. Penilaian hasil belajar

a. Ujian

Setiap mahasiswa harus mengikuti ujian tertulis untuk masing-masing mata kuliah pada akhir semester. Ujian dapat dilakukan setelah mata kuliah diseminarkan sekurang kurangnya 12 kali pertemuan dan sebanyak-banyaknya 14 kali pertemuan. Selain ujian akhir semester, dosen pengampu mata kuliah dapat melakukan ujian tengah semester atau ujian-ujian terstruktur lainnya.

Tidak ada ujian ulangan untuk suatu mata kuliah, setelah nilai diumumkan. Bagi peserta yang gagal, diwajibkan mengikuti kuliah dan ujian pada paket semester berikutnya.

Mahasiswa yang berjak menhikuti ujian semester suatu mata kuliah adalah mereka yang terdaftar dalam mata kuliah tersebut dan mengikuti 75% kehadiran dosen.

b. Penilaian

Penilaian terhadap hasil ujian akhir semester dan tesis dapat dilakukan dengan member nilai angka, yang kemudian dikonversi kepada nilai huruf yang diberi bobot sebagai berikut:

Daftar Konversi Nilai

Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Bobot
95-100	A+	4.00
90-94,9	A	3.75
85-89,9	A-	3.50
80-84,9	B+	3.25
75-79,9	B-	2.75
65-69,9	C+	2.50
60-64,9	C	2.25
55-59,9	C-	2.00
≤55	E	00

Penilaian terhadap prestasi belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah diberikan berdasarkan gabungan nilai

makalah, nilai presentasi dan partisipasi dalam seminar dan nilai UTS dan UAS. Nilai lulus untuk mata kuliah utama keahlian paling rendah adalah B dan untuk mata kuliah penunjang dan pilihan palainh rendah adalah C+.

c. Indeks Prestasi

Indeks prestasi (IP) adalah hasil perhitungan akhir jumlah nilai rata-rata seluruh mata kuliah dalam waktu tertentu. Indeks prestasi semester (IPS) dilakukan setelah mata kuliah semester yang bersangkutan diterima dari para dosen.

Penentuan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)dilakukan setelah mahasiswa dapat menyelesaikan studinya. IPK adalah hasil perhitungan jumlah nilai (Jumlah SKS dikali Nilai Bobot) semua mata kuliah wajib dan pilihan ditambah Tesis dibagi Jumlah SKS.

d. Predikat Kelulusan

Peserta dinyatakan lulut apabila memperoleh IPK tidak kurang dari 2,75. Predikat Kelulusan peserta adalah sebagai berikut:

Daftar Konversi Predikat dan IPK

Predikat	IPK
Cum Laude	3,65-4,00
Amat Baik	3,25-3,64
Baik	3,00-3,24

Predikat Suma Cum Laude hanya diberikan kepada peserta yang masa studinya tidak lebih dari 2 tahun (4 semester), dan tidak memiliki nilai C, serta tidak pernah mengulang atau perbaikan nilai dalam seluruh mata kuliah yang diikuti.

6. Masa Langkau

Yang dimaksud dengan masa langkau adalah suatu tenggang waktu tertentu menurut ukuran masa perkuliahan, yang dengan sengaja tidak digunakan oleh mahasiswa untuk kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam batasmasa studinya, dengan cara tidak mendaftarkan menjadi mahasiswa pada masa tersebut karena suatu keperluan yang diperbolehkan.

Ketentuan mengenai pengambilan masa langakau tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sekurang-kurangnya telah mengikuti perkuliahan 1 tahun.
b. Masa langkau yang diambil tidak boleh lebih dari 4 semester baik berurutan maupun tidak.

Pengambilan masa langkau sekurang-kurangnya 2 semester dilakukan pada awal tahun akdemik/semester ganjil

dengan mengajukan permohonan pengambilan masa langkau tersebut sebelum masa pendaftaran berakhir.

Mahasiswa yang mengambil masa langkau tidak dikenakan SPP dan atau biaya-biaya lainnya, serta tidak berhak mengikuti kegiatan-kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi selama masa langkau tersebut.

Permohonan masalangkau diajukan oleh mahasiswa kepada Direktur setelah mendapat persetujuan atau diketahui oleh Penasehat Akademik (PA). Selanjutnya, Direktur melanjutkan permohonan mahasiswa tersebut kepada bagian Akademik dan Kemahasiswaan untuk diproses dan diterbitkan surat keterangan masa langkaunya. Masa Langkau tidak mengurangi masa studi yang bersangkutan (8 semester).

7. Alpa Studi

Mahasiswa Alpa Studi adalah mahasiswa yabg tidak mendaftar ulang dan tidak pula menggunakan masa langkau sebelum habis masa studinya, atau mahasiswa yang sudah habis masa langkaunya tetapi tidak mendaftar ulang sebelum habis masa studinya.

Mahasiswa putus studi yang disebabkan IPKnya tidak memenuhi persyaratan diberhentikan untuk seterusnya pada program lain. Mata kuliah yang telah diikuti pada program lain. Mata kuliah yang diikuti pada program lama dan memperoleh nilai sekurang-kurangnya B- dapat ditransfer ke

program baru sepanjang kurikulum dan silabusnya sama pada program studi baru yang diambil mahasiswa bersangkutan.

8. Skorsing

Mahasiswa yang diskorsing adalah mahasiswa yang terkena snksi dan pencabutan sementara haknya mengikuti kegiatan akademis.

Mahasiswa tersebut diterima kembali pada jurusan/program yang sama tanpa mengurangi masa studi baginya selama skorsing, dan harus mendaftar ulang pada awal semester dengan ketentuan yang berlaku setelah masa skorsingnya habis.

Mahasiswa yang terkena sanksi tersebut, bila tidak mendaftar setelah habis masa skorsingnya dinyatakan kehilangan hak/statusnya sebagai mahasiswa PPs IAIN SH Banten.

9. Pemberhentian

Mahasiswa yang dikeluarkan dicabut haknya sebagai mahsiswa PPs, dan diberhentikan untuk seterusnya dari IAIN SMH Banten, karena alas an yang tidak dapat dimaafkan.[36]

---

[36] Pedoman Akademik (Serang: Program Pascasarjana IAIN SMH Banten, 2015).

E. Dosen-dosen Pengajar di PPS SMH

No	DOSEN TETAP DAN LUAR BIASA	Ket
1	Prof. Dr. E. Syibli Syarjaya, LML., M. M	
2	Prof. Dr. Fauzul Iman, M. A.	
3	Prof. Dr. M. A. Tihami, M. A., M. M	
4	Prof. Dr. Utang Ranuwijaya, M. A	
5	Prof. Dr. Ilzamudin, M. A	
6	Prof. Dr. E. Syarifudin, M. Pd	
7	Prof. Dr. Sholeh Hidayat, M. Pd	
8	Prof. Dr. KH. A. Wahab Afif, M. A	
9	Prof. Dr. M. Yunus Ghozali	
10	Prof. Dr. Suparman Usman, S. H	
11	Prof. Dr. Athoullah Ahmad, M. A	
12	Prof. Dr. Prof. Dr. Amir Nuruddin, M.A.	
13	Prof. Dr. Fathurrahman Jamil, M.A DTT	
14	Dr. Mustofa E. Nasution, M.Sc, MAEP, Ph.D.	
15	Dr. B. Syafuri, M. Hum	
16	Dr. Zakaria syafe'I, M. Pd	
17	Dr. Badriah Amir, M. M	
18	Dr. Nihayatul Maskuroh, M. Si	
19	Dr. Moh Amin, M. M	
20	Dr. A. M. Romly, M. Hum	
21	Dr. Suadi Sa'ad, M. Ag	
22	Dr. Naf'an Tarihoran, M. Hum	
23	Dr. Eneng. Muslihah, Ph. D	
24	Dr. Muhajir, M. A	

25	Dr. Wawan Wahyudin, M. Pd	
26	Dr. Oom Mukaromah, M. Hum	
27	Dr. Ida Nursida, M. A	
28	Dr. Itang, M. Ag.	
29	Dr. Ahmad Sanusi, Lc., M. A.	
30	Dr. Shobri, S. Kom., M.M.	
31	Dr. Darwyansyah, Ph. D.	
32	Dr. Budi Sudrajat, M. A.	
33	Mufti Ali, Ph. D.	
34	Dr. Samsudin, M. Pd.	
35	Dr. Sholahuddin Al- Ayubi, M.A.	
36	Dr. Helmy Faizi. B. U, M. Hum.	
37	Dr. Hidayatullah, M. Pd.	
38	Dr. Apud, M. Pd.	
39	Dr. Supardi, M. Pd.	
40	Dr. Hunainah, M.M.	
41	Dr. Muhammad Isom, M.A.	
42	Dr. Anis Fauzi, M.Si.	
43	Dr. Oni sahroni.	
44	Dr. Hudaeri, M.A.	
45	Dr. Efi Syarifudin, M.M.	
46	Dr. Subhan, M.Ed.	
47	Drs. Herli Salim, M. Ed., Ph.D.	
48	Dr. Yusuf Somawinata, M. Ag.	
49	Dr. Mahfud, M. M.	
50	Dr. Sohari, M. M., M.H.	
51	Dr. A. Zaini, M. Si.	

52	Dr. Susari, M. A.	
53	Dr. Yanwar Pribadi, M. A., Ph.D.	
53	Dr. Nana Jumhana, M. Ag.	
54	Dr. Masrukhin Muhsin, Lc., M.A.	
55	Dr. Sohari, M. M., M.H.	
56	Dr. Elvin Bastian, S.E. Ak., M.Si.	
57	Dr. Ahmadi, M.Si.	
58	Dr. Ade Jaya Sutisna	
59	Dr. Chatib Rasyid, M.H.	
60	Dr. Rizkullah	
61	Dr. Kuswantoro	
62	Dr. M. Khoirin, Ph.D.	
63	Dr. M. Soleh	
64	Drs. M. A. Djazimi, M.Pd.	
65	M. Nur Arifin, M. Pd.	
66	Endad Musadad, S.Ag., M.A.	
67	Drs. Hafid Rustiawan; M.Ag.	
68	M. Shoheh, M. A.	
69	Masduki, S.Ag., M.A.	

BAB V
KORELASI KURIKULUM KKNI DENGAN INDONESIA MENGHADAPI MEA

A. Tantangan Pendidikan Menyongsong MEA

Terbayangkah oleh kita jika sopir angkot orang Myanmar? Bagaimanakah jika buruh pabrik dan pekerja bangunan orang Laos dan Kamboja? Apa yang akan terjadi jika pedagang kecil di pasar orang Thailand? Mayoritas kita hanya mengernyitkan dahi sambil bertanya-tanya keheranan sekaligus karena dalam benak kita jenis-jenis pekerjaan tersebut tidak mungkin diminati oleh orang asing. Namun, saya tegaskan bahwa hal itu mungkin terjadi setelah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community berlaku pada 1 Januari 2016.[37]

Masyarakat Indonesia akan bersaing dengan tenaga kerja asing pasca mereka lulus dalam satu tahun ke depan. Suatu fakta yang tidak bisa dihindari karena perjanjian tersebut telah disepakati oleh anggota-anggota ASEAN. Meski saat ini hanya terbatas beberapa sektor, perjanjian ini menimbulkan tanda

[37] http://www.kompasiana.com/yusufbh4/tantangan-pendidikan-menyongsong-mea_54f3d97e745513962b6c80e4. Diunduh pada tanggal 13 Agustus 2015.

tanya bagi insan pendidikan tentang sejauh mana kemampuan anak didik Indonesia bersaing secara global.[38]

Semakin dekatnya MEA dan masih banyaknya masyarakat yang belum memahami hal ini, besar kemungkinan menjadi masalah besar sebab akan muncul keterkejutan massal terutama bagi angkatan kerja yang tidak terdidik dan terlatih. Data BPS 2014 menunjukkan bahwa penduduk di atas 15 tahun yang bekerja berdasarkan pendidikan secara berurutan SD ke bawah 46, 8%, SLTP 17, 82%, SLTA 25,23% dan pendidikan tinggi 10, 14%.[39]

Dengan komposisi mayoritas lulusan pendidikan dasar, apakah dunia pendidikan Indonesia siap menyiapkan sumber daya yang kompetitif?. Jika melihat fakta yang terjadi maka rasa pesimis akan tinggi mengingat pendidikan di Indonesia masih belum tertata dengan baik. Jangankan berbicara penyiapan sumber daya menghadapi pasar bebas, dunia pendidikan kini lebih disibukan dengan bongkar pasang kurikulum. Idealnya sebelum perjanjian ini dimulai pemerintah dan bangsa Indonesia terlebih dahulu menyiapkan

---

[38] http://www.kompasiana.com/yusufbh4/tantangan-pendidikan-menyongsong-mea_54f3d97e745513962b6c80e4. Diunduh pada tanggal 13 Agustus 2015.

[39] http://www.kompasiana.com/yusufbh4/tantangan-pendidikan-menyongsong-mea_54f3d97e745513962b6c80e4. Diunduh pada tanggal 13 Agustus 2015.

strategi penyiapan sumber daya dan infra struktur pendukung yang optimal.[40]

Bagaimana bangsa Indonesia merespon MEA yang sudah ada di pelupuk mata? Akankah kita korbankan generasi sekarang bersaing tanpa persiapan?. Era perdagangan bebas ASEAN harus disambut oleh dunia pendidikan dengan cepat agar sumber daya manusia Indonesia bisa siap menghadapinya tanpa banyak menimbulkan masalah.

Peningkatan kompetensi *soft skill* dan *hard skill* siswa merupakan agenda utama agar bisa merespon perubahan tersebut. *Hard skill* bisa dilakukan dengan peningkatan berbagai ketrampilan seperti, pembudidayaan tanaman, pemasaran produk, penggunaan alat/teknologi dan bahasa Inggris. Sedangkan *soft skill* lebih kepada pengembangan sikap dan mengelola manusia seperti, kepemimpinan, kerja sama, komunikasi dan pengembangan pribadi.

Dalam jangka waktu yang singkat, *hard skill* merupakan keniscayaan karena mayoritas *output* pendidikan Indonesia akan bekerja di sektor bawah atau tenaga kasar. Ketrampilan ini bisa diupayakan dengan cepat karena mereka akan diajarkan bagaimana cara bekerja. Adapun pengembangan *soft skill* diprioritaskan bagi tenaga kerja level manajemen yang

---

[40] http://www.kompasiana.com/yusufbh4/tantangan-pendidikan-menyongsong-mea_54f3d97e745513962b6c80e4. Diunduh pada tanggal 13 Agustus 2015.

umumnya sulit didapat oleh tenaga kerja lulusan pendidikan dasar dan menengah. Akan tetapi, jika ketrampilan ini dimiliki maka akan meningkatkan kwalitas kerja sehingga daya saing tenaga kerja meningkat.

Menyiapkan sumber daya manusia bukanlah pekerjaan mudah dan bisa dilakukan secara instant. Namun, setidaknya guru dan sekolah bisa membekali siswa dengan kedua ketrampilan tersebut ditambah dengan meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi agar terus mengembangkan diri. Karena hal itu merupakan upaya minimal yang bisa dilakukan tetapi sangat fundamental untuk meningkatkan mentalitas dalam menghadapi persaingan global.

B. SDM dan MEA

Beberapa bulan yang lalu seorang teman diterima sebagai pengajar di satu sekolah swasta di Pekanbaru. Menurut penuturan pimpinannya, ia adalah orang Indonesia pertama yang diterima untuk menjadi pengajar Sains di lembaga itu. Penulis sempat bertanya; apakah tidak ada sarjana lokal yang bisa memenuhi kriteria sampai-sampai lembaga tersebut ‘terpaksa’ merekrut orang Filipina ataupun orang asing lainnya. Lembaga tersebut memang memberlakukan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk subjek-subjek tertentu termasuk Sains. Dari sini masalahnya mulai tampak jelas; kemampuan bahasa asing. Gambaran di atas hanyalah sedikit sentilan tentang kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ada di daerah. Memang kemampuan bahasa asing bukanlah satu-

satunya nilai penentu kualitas SDM. Bahasa asing perlu tapi bukanlah segala-galanya. Tingkat kompetensi atas bidang yang ditekuni selama duduk di bangku sekolah atau perguruan tinggi, lifeskill yang diperoleh melalui lembaga-lembaga pelatihan ataupun pengalaman, dan kemudian diikuti oleh kemampuan beradaptasi merupakan hal yang terpenting.[41] ASEAN Economic Community (AEC) atau lebih dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan segera diberlakukan pada 2015. MEA merupakan integrasi ekonomi kawasan Asia Tenggara dan merupakan salah satu pilar integrasi masyarakat ASEAN (ASEAN *Community*) yang telah ditetapkan pemerintah negara-negara ASEAN beberapa tahun yang lalu. Di atas kertas, integrasi ini bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan memperkecil jurang sosio-ekonomi (*socio-economic gap*) penduduk di negara-negara ASEAN. Pemerintah Indonesia menyadari ada peluang sekaligus tantangan yang akan dihadapi dalam implementasi MEA.

Inti dari integrasi ekonomi ini adalah pemberlakuan pasar bebas atau liberalisasi ekonomi untuk menjadikan kawasan sebagai pasar tunggal berbasis produksi. Liberalisasi yang diterapkan memberikan ruang yang lebih luas dan lebih lancar bagi pergerakan arus barang, jasa, investasi, modal dan tenaga kerja terampil (*skilled labors*) intra negara-negara ASEAN.

---

[41]http://www.haluanriaupress.com/index.php?option=com_content &view=article&id=11843:siapkah-sdm-kita-menghadapi mea&catid=35:halaman-04&Itemid=60. Diundah pada tanggal 13 Agustus 2015.

Indonesia tidak dapat mengelak dari globalisasi dan tuntutan MEA selain memang adanya *political will* untuk mewujudkan agenda tersebut. Penduduk yang ada di dalamnya pun tak bisa lepas dari konsekuensi kebijakan yang telah dibuat. Pergerakan lintas batas negara tenaga kerja terampil dengan pendidikan yang lebih baik seperti dokter, perawat, insinyur, akuntan dan tenaga kerja profesional lainnya akan menjadi hal yang lumrah. Namun MEA adalah ruang berkompetisi di mana tenaga kerja terampil dalam negeri akan bersaing dengan tenaga kerja terampilasing.[42]

Salah satu kekhawatiran dalam implementasi MEA bagi Indonesia terkait masalah SDM. Di tengah-tengah tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, terdapat berjuta tenaga kerja tak terampil (*unskilled*) berlatar belakang pendidikan rendah. Jumlah tenaga kerja terampil yang dihasilkan perguruan tinggi juga masih sangat kurang, tak sebanding dengan luasnya wilayah Indonesia. Sementara, Indonesia adalah pasar terbesar di kawasan sehingga diperkirakan menjadi sasaran penyebaran SDMasing.

Disparitas pendidikan antar negara-negara ASEAN berdampak pada dan berjalan seiring dengan disparitas SDM terampil yang dihasilkan. Dalam survei yang dilakukan oleh QS.World University Rangkings (2013),5 universitas teratas (top 5) di tingkat kawasan Asia Tenggara berada di Singapura,

---

[42]http://www.haluanriaupress.com/index.php?option=com_content &view=article&id=11843:siapkah-sdm-kita-menghadapi mea&catid=35:halaman-04&Itemid=60. Diundah pada tanggal 13 Agustus 2015.

Thailand dan Malaysia. Dua dari beberapa kriteria yang dinilai adalah *academic reputation* dan *employer reputation*. Berdasarkan lembaga survei independen tersebut, Indonesia masih tertinggal dari ketiga Negara yang disebutkan tadi yang kini sedang memimpin ekonomi ASEAN. *Academic reputation* menyangkut citra perguruan tinggi dalam menghasilkan karya sainstifik yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan masyarakat, sedangkan *employer reputation* menyangkut tempat dimana para sarjana atau tamatan perguruan tinggi tersebut menerapkan kompetensi yang mereka miliki. Semakin banyak karya yang dihasilkan dan semakin banyak tamatan yang bekerja di institusi-institusi bergengsi maka semakin tinggi tingkat *positioning* perguruan tinggi tersebut.[43]

MEA dapat menjadi peluang bagi SDM terampil nan andal dalam negeri untuk menyalurkan kompetensi yang dimiliki secara lebih luas di kawasan, tidak terbatas di dalam negeri saja. Begitu juga disparitas kualitas perguruan tinggi dan pendidikan dapat diperkecil. Dunia ibaratkan satu jaring laba-laba (*spider web*) di mana tiap helai jaringnya saling terhubung dan terjalin. Integrasi negara-negara ASEAN akan memungkinkan terjadinya *excellence sharing* antar perguruan tinggidi seluruh negara ASEAN termasuk yang ada di daerah-daerah.

---

[43]http://www.haluanriaupress.com/index.php?option=com_content &view=article&id=11843:siapkah-sdm-kita-menghadapi mea&catid=35:halaman-04&Itemid=60. Diundah pada tanggal 13 Agustus 2015.

Konektivitas yang intens dan tuntutan adaptasi akan mampu memaksa kita mengejar ketertinggalan baik dari pertumbuhan ekonomi ataupun kemajuan pendidikan. Tidak dapat dipungkiri, negara dengan ekonomi yang lebih baik memiliki kualitas pendidikan yang lebih baik pula, begitu pula sebaliknya. Sumber daya alam yang melimpah dan potensi pasar yang ada tidak menjamin kesejahteraan bila SDM masih belum mampu bersaing. Jangan sampai para sarjana lokal kaget bila di berbagai sektor bisnis ternyata terdapat orang-orang dari negara tetangga yang lebih kompetitif dan lebih mampu beradaptasi di 'tanah' sendiri. Sementara masih saja banyak yang 'terlena'mendambakan status PNS yang jumlahnya sangat terbatas, dan enggan pula untuk meningkatkan kualitas diri. Bila tidak merubah cara pandang, SDM di sini hanya akan menjadi 'penonton' atau 'pemeriah'.

Pemerintah daerah juga dituntut bersiap menghadapi MEA. Pemda dapat bersinergis dengan perguruan tinggi yang ada di daerah untuk merumuskan strategi dan kebijakan yang tepat khususnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan SDM lokal. Karena pada dasarnya pemerintah daerahlah yang akan merasakan langsung kebijakan MEA, sementara pemerintah pusat hanya sekedar memfasilitasi konsultasi dan membuat regulasi.

C. Kurikulum dan MEA

Pada tahun 2015, Indonesia akan menghadapi pasar bebas ASEAN yang kita kenal dengan sebutan MEA

(Masyarakat Ekonomi ASEAN). Para pemimpin ASEAN sepakat membentuk MEA agar daya saing ASEAN meningkat serta bisa menyaingi Cina dan India untuk menarik investasi asing. Penanaman modal asing di wilayah ASEAN sangat dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Dan ini memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara sehingga kompetisi akan semakin ketat. Tidak hanya arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja professional, seperti dokter, pengacara, akuntan, dan lainnya. Oleh karena itu, Indonesia harus mempersiapkan datangnya pasar bebas tersebut. Diantaranya adalah penguasaan bahasa internasional yaitu bahasa Inggris.[44]

Jokowi, yang saat ini menjabat sebagai presiden RI, setuju dengan dihapusnya pelajaran bahasa Inggris untu anak SD karena pelajaran bahasa Inggris lebih baik diberikan kepada siswa SMP tuturnya. Alasannya, supaya siswa sekolah dasar memiliki rasa nasionalisme.

Penghapusan pelajaran Bahasa Inggris untuk SD dilakukan secara bertahap. Pada tahun lalu hanya kelas satu dan dua yang tidak mendapat pelajaran Bahasa Inggris. Pada tahun ajaran 2014/2015, mata pelajaran Bahasa Inggris di SD tidak diajarkan untuk kelas satu, dua, tiga, dan empat. Dan

---

[44] http://novinurilfirdaus.blogspot.com/2014/11/kurikulum-2013-vs-mea_28.html. Diunduh pada tanggal 13 Agustus 2015.

tahun selanjutnya, pada 2015/2016 mendatang, kelas satu, dua, tiga, empat, dan lima tidak mendapat pelajaran Bahasa Inggris. Barulah pada 2016/2017, seluruh tingkat pendidikan SD tak akan mendapat pelajaran Bahasa Inggris.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Sejak 3 tahun sampai 6 tahun otak anak memang terus berkembang tetapi lebih lambat. Area otak yang paling berkembang di tahap ini adalah bahasa, memori, pendengaran dan penglihatan. Lebih khusus, dari bulan pertama kehidupan sampai tiga tahun, anak-anak dengan penuh perhatian mengamati, mendengarkan, mengupayakan untuk mengingat dan belajar dari segala sesuatu di sekitar mereka, terutama bahasa.

Mempelajari bahasa Inggris seharusnya diberikan sejak dini ketika anak belum mengalami masa pubertas. Jika belajar saat atau setelah masa pubertas maka akan tidak begitu mudah jadinya untuk mempelajari *pronunciation* (cara melafalkan bahasa). Seorang ahli Bahasa Inggris, Lenneberg (1967:116) mengatakan; "*There was a neurologically based 'critical period', which completes mastery of language, but it is no longer possible, because it will end around the onset of puberty*". Menurut Lenneberg, seorang individu mempunyai masa penting (*periode sensitif*) untuk dapat dengan mudah dan cepat menguasai bahasa, yang disebut dengan '*critical period'* pada saat individu tersebut belum memasuki masa pubertas. Ketika masa pubertas itu datang maka 'critical period'

memudar sehingga akan mengalami kesulitan untuk menguasai bahasa asing tersebut.[45]

Pakar bahasa Inggris lainnya, Lightbown & Spada (1999:60) melakukan observasi terhadap anak-anak dari keluarga imigrasi yang datang dari negara lain dan menetap di USA. Penelitian tersebut menemukan bahwa anak-anak imigrasi tersebut yang belum mencapai masa pubertas, dapat berbicara dalam bahasa Inggris dengan *pronunciation* yang bagus seperti *native speaker*. Sedangkan orang tuanya tidak dapat mencapai kemampuan seperti anak-anaknya. Memang para orang tua tersebut dapat berbicara dengan lancar tetapi mereka mempunyai kesulitan dalam *pronunciation*, pemilihan kata, dan *grammar* yang seharusnya digunakan.[46]

Selain itu, individu yang baru mempelajari bahasa Inggris ketika sudah mencapai masa pubertas akan dipengaruhi dengan masalah psikologi. Karena motivasi anak-anak dan remaja akan berbeda. Jika anak-anak, belajar bahasa Inggris dalam suasana *relax* dan bisa sambil bermain. Namun, jika sudah mencapi masa pubertas, mereka mempunyai kemampuan membaca dan menganalisa situasi yang mereka hadapi sehingga mereka merasa kemampuan mereka dievaluasi dan akan malu jika tidak mencapai target yang mereka inginkan.

Agar tidak menyia-nyiakan masa emas tersebut, jadi sebaiknya mata pelajaran bahasa Inggris untuk anak SD tidak

---

[45] http://novinurilfirdaus.blogspot.com/2014/11/kurikulum-2013-vs-mea_28.html. Diunduh pada tanggal 13 Agustus 2015.

[46] http://novinurilfirdaus.blogspot.com/2014/11/kurikulum-2013-vs-mea_28.html. Diunduh pada tanggal 13 Agustus 2015.

dihapus guna mempersiapkan pasar bebas untuk masa depan mereka dengan tidak melupakan nilai-nilai nasionalisme yang ingin dibentuk pada diri siswa. Adanya pelajaran bahasa Inggris juga demi kepentingan Indonesia agar tidak banyak pekerja nasional nantinya yang tergeser karna minimnya kemampuan berbahasa di pasar bebas yang akan datang. Pepatah arab juga mengatakan; Belajar di masa kecil bagaikan mengukir di atas batu. Sementara belajar di waktu dewasa bagaikan mengukir di atas air.

D. Kurikulum KKNI Vs MEA

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), di satu satu sisi merupakan peluang bagi mereka yang mempunyai kualitas atau daya saing tinggi, tetapi di sisi lain merupakan tantangan bagi mereka yang kualitas atau daya saingnya rendah.

Salah satu persiapan Indonesia dalam menghadapi MEA adalah diterapkannya kurikulum berbasis KKNI. Kurikulum ini pada intinya adalah adalah tingkatan atau level yang bisa dicapai tidak hanya melalui jalur pendidikan saja, tetapi juga bisa ditempuh melalui jalur pelatihan atau juga otodidak. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi perguruan tinggi. Mereka tidak hanya bersaing sesama perguruan tinggi yang ada, tetapi juga bersaing dengan lembaga-lembaga pelatihan yang ada.

Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Program Pascasarjana IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, keduanya belum menerapkan kurikulum berbasis KKNI. Mereka baru menerapkan kurikulum ini pada tahun ajaran mendatang, yaitu tahun akademik 2016/2017. Meskipun

kedua lembaga ini belum menerapkan KKNI, tetapi masalah perlevelan sudah bisa diterapkan, yaitu level 8 bagi strata dua dan level 9 bagi strata tiga.

Menurut hemat peneliti, para alumni kedua lembaga ini bisa bersaing pada tataran regional (kawasan ASEAN), yaitu bisa menjadi tenaga pendidik agama, tenaga pendakwah, guru baik formal maupun non formal. Mereka bisa menjadi tenaga profesional di lembaga pendidikan Islam atau lembaga dakwah yang ada di Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura dan lain-lain.

Peningkatan kompetensi *soft skill* dan *hard skill* merupakan agenda utama agar bisa merespon perubahan tersebut. *Hard skill* bisa dilakukan dengan peningkatan berbagai ketrampilan seperti, pembudidayaan tanaman, pemasaran produk, penggunaan alat/teknologi dan bahasa Inggris. Sedangkan *soft skill* lebih kepada pengembangan sikap dan mengelola manusia seperti, kepemimpinan, kerja sama, komunikasi dan pengembangan pribadi.

Tantangan bagi bangsa Indonesia adalah kemampuan berbahasa Inggris yang masih lemah. Padahal kemampuan berbahasa Inggris merupakan kebutuhan dan keniscayaan sebagai bahasa pengantar atau bahasa komunikasi di kawasan ASEAN.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengajak dunia pendidikan optimis memasuki

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. "Untuk memasuki MEA 2015, dalam dunia pendidikan kita harus selalu berpikir optimis terhadap keberhasilan pendidikan di Indonesia. Saya percaya sikap optimis akan selalu menular,"[47]

Mendikbud mengajak pengelola institusi satuan pendidikan untuk melakukan berbagai hal yang mendasar dalam memajukan dunia pendidikan, dan kesadaran mengenai pentingnya pengembangan sumber daya manusia dalam masyarakat. "Lakukan pengembangan dunia pendidikan jangan sekedar simbolik, tetapi lakukanlah secara fundamental atau mendasar," Pendidikan, harus menjadi wadah yang menyenangkan. Seperti yang pernah ditulis oleh Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hadjar Dewantara. Sekolah merupakan taman yang menyenangkan bagi para anak-anak Indonesia. Mengingat kembali pesan Bapak Pendidikan Indonesia, sebagai contoh Mendikbud menghimbau institusi pendidikan untuk memanfaatkan kesukaan atau kegemaran para peserta didik menjadi alat belajar.[48]

"Tujuan kita adalah untuk menjadikan anak-anak menjadi pembelajar. Kalau seseorang bisa menjadi pembelajar, maka seumur hidup dia bisa belajar terus dan bisa meraih masa depan yang cerah,". Mendikbud mengatakan kebutuhan pada era MEA 2015 adalah generalis atau orang-orang yang bisa menjadi pembelajar seumur hidup. Bidang yang dipelajari saat

---

[47] http://www.kemdiknas.go.id/kemdikbud/node/3709. Diunduh pada tanggal 13 Agustus 2015.

[48] http://www.kemdiknas.go.id/kemdikbud/node/3709. Diunduh pada tanggal 13 Agustus 2015.

ini belum tentu relevan di masa mendatang. Dengan begitu rangsangan untuk menjadi pembelajar akan sangat bermanfaat ketika berkarya di masa depan. Bila dapat menjadikan anak Indonesia menjadi pembelajar seumur hidup, Insya Allah kita akan memiliki anak Indonesia yang terbaik, dan menjadi negara yang penuh percaya diri di masa depan.

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian tersebut di atas, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:
Bahwa ada korelasi antara kurikulum KKNI dengan Indonesia menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN).

B. Saran-saran

Untuk menghadapi MEA tahun 2015, peneliti menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

   Hendaknya pemerintah lebih mempersipkan warganya agar menjadi SDM yang handal yang mampu berkompetisi di kawasan regional ASEAN, sehingga tidak menjadi tamu di negerinya sendiri.

2. Bagi Lembaga

   Hendaknya lebih meningkatkan lagi muatan kurikulum, sehingga mampu bersaing atau berkompetisi di kawasan

regional ASEAN, dan perlu menambah kemampuan dalam berbahasa Inggris.

3. Bagi Warga Negara Indonesia

Mempersiapkan diri dengan *hard skill* dan *soft skill. Hard skill* bisa dilakukan dengan peningkatan berbagai ketrampilan seperti, pembudidayaan tanaman, ikan, pemasaran produk, penggunaan alat/teknologi, dan lain-lain. Sedangkan *soft skill* lebih kepada pengembangan sikap dan mengelola manusia seperti, kepemimpinan, kerja sama, komunikasi dan pengembangan pribadi, juga kemampuan berbahasa Inggris.

DAFTAR PUSTAKA

Aijudin, Anas. “Pesantren Tahfidziyah: Analisis Pengembangan Kurikulum di PP al-Muayyad Windan Sukoharjo” dalam *Edukasi*, Vol. VII, No. 4 Oktober-Desember 2009 (Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Depag RI, 2009).

Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), cet XI.

Doll, Ronald C. *Curriculum Improvement, Decision Making and Process* (Boston: Allyn and Bacon, 1964).

Henson, Kenneth T. *Curriculum Development for Education Reform* (New York: Harper Collin College, 1995).

http://www.haluanriaupress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=11843:siapkah-sdm-kita-menghadapi mea&catid=35:halaman-04&Itemid=60. Diundah pada tanggal 13 Agustus 2015.

http://www.kemdiknas.go.id/kemdikbud/node/3709. Diunduh pada tanggal 13 Agustus 2015.

http://www.kompasiana.com/yusufbh4/tantangan-pendidikan-menyongsong-mea_54f3d97e745513962b6c80e4. Diunduh pada tanggal 13 Agustus 2015.

http://novinurilfirdaus.blogspot.com/2014/11/kurikulum-2013-vs-mea_28.html. Diunduh pada tanggal 13 Agustus 2015.

Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada, 2009).

Mantra, Dodi. *Hegemoni & Diskursus Neoliberalisme*. Mantrapress: Bekasi Thongphane Savanphet, *ASEAN-China Dialogue Relations: Present and Future*, dalam *China's*. 2011.

Rosyada, Dede dan Sayuthi, Wahdi. "Problematika Penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di Madrasah" dalam *Edukasi*, Vol.5, No. 1, Januari-Maret 2007 (Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2007).

Sailah, Illah. dkk. *Buku Kurikulum Pendidikan Tinggi* (Jakarta: Direktorat Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2014).

Tim Kurikulum dan Pembelajaran Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. 2014. *Buku Kurikulum Perguruan Tinggi*. www.kopertis12.or.id diakses pada 15 Juli 2015.
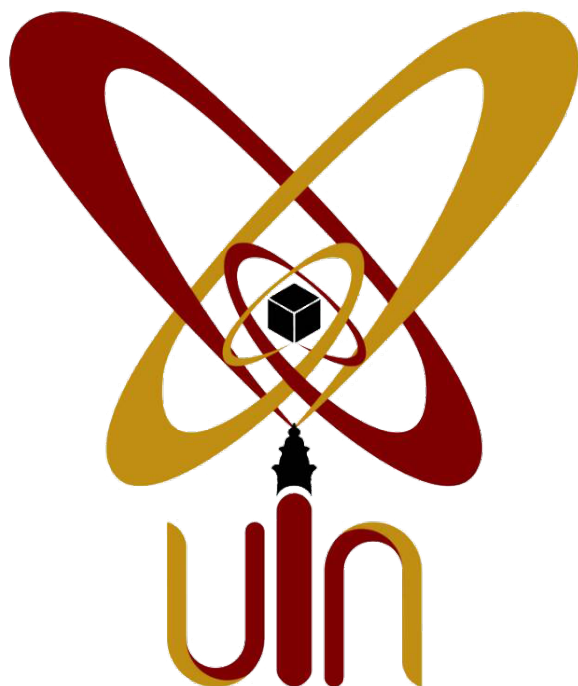
MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) dapat menjadi peluang bagi SDM terampil dan handal untuk menyalurkan kompetensi yang dimiliki secara lebih luas di kawasan, tidak terbatas di dalam negeri saja. Peningkatan kompetensi soft skill dan hard skill merupakan agenda utama agar bisa merespon perubahan tersebut. Hard skill bisa dilakukan dengan peningkatan berbagai ketrampilan seperti, pembudidayaan tanaman, pemasaran produk, penggunaan alat/teknologi. Sedangkan soft skill lebih kepada pengembangan sikap dan mengelola manusia seperti, kepemimpinan, kerja sama, komunikasi dan pengembangan pribadi. Itu semua bisa dicapai dengan mempersiapkan kurikulum (KKNI) yang handal, yang dapat menghasilkan alumni yang mampu bersaing di kawasan regional ASEAN.

Diterbitkan oleh:
Pusat Penelitian dan Penerbitan
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP2M)
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
"Sultan Maulana Hasanuddin" Banten

Bekerja sama dengan:
Penerbit A-Empat
Puri Kartika Banjarsari C1/1 Serang 42123
www.a-empat.com
E-mail: info@a-empat.com